

**HEGEMONI SOSIAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(STUDI KASUS MASYARAKAT PATTE'NE)
KABUPATEN TAKALAR**



SKRIPSI

**Oleh
FITRI DEWI HANDAYANI
10538297414**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SOSIOLOGI
AGUSTUS2018**

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil,

yang diulang hari demi hari

Kupersembahkan karya ini untuk ayah dan ibuku tercinta,
saudara-saudaraku, keluarga, sahabat serta seluruh kawan-kawanku.

Terima kasih do'a dan motivasinya selama ini.

ABsTRAK

Fitri Dewi Handayani, 2018. Hegemoni Sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Masyarakat Patte'ne) Kabupaten Takalar. (Dibimbing oleh: Budi Setiawati dan Jaelan Usman).

Masalah utama dalam penelitian ini adalah pada tahun politik 2017 lalu yaitu kontestasi pemilihan kepala daerah Takalar berlangsung ricuh. Dalam kontestasi pilkada tersebut kandidat nomor 1 melakukan gugatan ke MK atas kekalahannya dengan mengajukan beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat nomor 2. Menyoroti proses kampanye dalam pilkada tahun 2017 lalu, menurut pengamatan dan observasi terjadi proses hegemoni sosial yang diterapkan oleh kandidat nomor 2. Hal tersebut akan dibuktikan dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 di kabupaten Takalar dan mengetahui bentuk hegemoni sosial dalam pilkada tahun 2017 masyarakat Patte'ne kabupaten Takalar. Informan ditentukan secara *purposive sampling*, berdasarkan karakteristik informan yang ditetapkan yaitu Personal KPU, kepala Lurah dan Masyarakat Patte'ne. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan mengumpulkan data secara detail dan juga aktual. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas politik dalam pilkada di kabupaten Takalar tahun 2017 terjadi konflik. Motif konflik tersebut adalah disebabkan oleh adanya tindakan profokatif yang dilakukan oleh kelompok timses atau partisipan kandidat nomor 2 sehingga memunculkan konflik kedua belah pihak yakni antar timses. Penyelesaian konflik tersebut menggunakan pendekatan akomodasi konsiliasi. Adapun bentuk hegemoni sosial dalam pilkada Takalar khususnya pada masyarakat Patte'ne dimana strategi tersebut sangat terstruktur dan terorganisir oleh kandidat nomor 2. Bentuk hegemoni sosial dinilai persuasif dan koersif dimana masyarakat dijebak ke dalam politik yang tidak demokratis. Upaya mempengaruhi tersebut adalah bagian penting dari kemenangan kandidat nomor 2 pada kontestasi pilkada tahun 2017 lalu.

Kata Kunci : Hegemoni Sosial, Pemilihan Kepala Daerah.

KATA PENGANTAR

Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberi motivasi dan selalu menemani dengan canda.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Drs. H. Nurdin, M.Pd.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Dr. Hj. Budi Setawati, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Pd. selaku pembimbing II, serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terimakasih yang juga penulis ucapkan kepada teman-teman yang selalu menemani dalam suka dan duka, sahabat-sahabatku terkasih serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi atas kebersamaan, motivasi, saran dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi pelangi dalam hidupku.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN SAMBUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iv |
| SURAT PERJANJIAN | v |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat penelitian..... | 11 |
| E. Definisi Operasional..... | 11 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|----------------------------|----|
| A. Kajian Teori | 13 |
| 1. Konsep Hegemoni..... | 13 |
| 2. Pilkada | 20 |
| 3. Sosiologi Hukum..... | 23 |
| 4. Masyarakat | 24 |
| 5. Analisis Teori | 25 |
| 6. Penelitian Relevan..... | 32 |
| B. Kerangka Konsep | 33 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-----------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 37 |
| C. Informan Penelitian..... | 37 |
| D. Fokus Penelitian | 38 |

| | |
|---------------------------------|----|
| E. Instrumen Penelitian..... | 40 |
| F. Jenis Data Penelitian | 43 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 48 |
| I. Teknik Keabsahan Data | 50 |
| J. Jadwal Penelitian..... | 52 |

BAB IV GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Umum Kabupaten Takalar Sebagai Daerah Penelitian..... | 53 |
| 1. Sejarah Singkat Kabupaten Takalar | 53 |
| 2. Kondisi Geografis | 55 |
| 3. Topografi, Iklim dan Geologi | 56 |
| 4. Kondisi Demografi..... | 60 |
| B. Deskripsi Khusus Kelurahan Patte'ne Sebagai Latar Penelitian..... | 61 |
| 1. Sejarah Singkat Patte'ne | 61 |
| 2. Batas-batas Wilayah..... | 62 |
| 3. Mata Pencaharian | 62 |
| 4. Kondisi Sosial Ekonomi..... | 62 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian | 65 |
|---------------------------|----|

| | |
|--|----|
| 1. Peran Pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Takalar | 65 |
| 2. Bentuk hegemoni sosial pada pilkada tahun 2017 masyarakat Patte'ne Kabupaten Takalar | 71 |
| B. Pembahasan..... | 74 |
| 1. Peran Pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Takalar | 76 |
| 2. Bentuk hegemoni sosial pada pilkada tahun 2017 masyarakat Patte'ne Kabupaten Takalar | 79 |

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|----|
| A. Simpulan | 82 |
| B. Saran..... | 84 |
| Daftar Pustaka | 86 |

Lampiran

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| Tabel. 1 Informan Penelitian..... | 38 |
| Tabel. 2Jadwal Penelitian..... | 52 |
| Tabel. 3 Batas-batas wilayah kabupaten Takalar | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---------------------------------------|---------|
| Gambar. 1.1 Bagan kerangka piker..... | 35 |
| Gambar. 1.2 Kabupaten Takalar | 58 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Lembar Observasi | 88 |
| 2. Pedoman Wawancara | 89 |
| 3. Data Informan dalam Wawancara..... | 91 |
| 4. Dokumentasi | 93 |
| 5. Administrasi Penelitian | 100 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Idealnya, Pemilu dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi dikarenakan hasil pemilu menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat jika diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat.

Sejak awal era reformasi, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan profil pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Untuk itu, telah dilakukan perubahan atas undang-undang bidang politik dan undang-undang bidang pemerintahan. Terkait dengan undang-undang bidang pemerintahan, telah dilakukan perubahan atas undang-undang mengenai pemerintahan daerah, agar proses penyelenggaraan pemerintahan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik, serta perubahan atas undang-undang mengenai pemilihan kepala

daerah, agar mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.

Pada awalnya, perdebatan mengenai mekanisme pilkada berlangsung intensif antara dua pilihan, yakni pilkada oleh DPRD atau pilkada secara langsung oleh rakyat. Kita sempat memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang ditetapkan oleh DPR RI periode 2009-2014, yang mengatur mekanisme pilkada oleh DPRD. Namun, undang-undang ini belum sempat dilaksanakan, karena mendapat penolakan secara luas oleh rakyat. Mempertimbangkan situasi politik pada saat itu, maka presiden RI menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat.

Setiap menjelang pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), siapa pun, di mana-mana, selalu membicarakan ihwal pesta demokrasi tersebut. Di warung, pasar, maupun kantor, semua tidak luput dari perbincangan tentang pesta politik ini. Apalagi jika seseorang menjagokan calon tertentu, di sudut gang yang seharusnya tidak banyak orang yang tertarik ihwal pesta demokrasi ini, ia masih memperbincangkannya. Maka, pilkada sejatinya tidak hanya memperbincangkan mengenai penegasan otonomi daerah dan regenerasi kepemimpinan lokal, melainkan juga berbicara mengenai bagaimana pemerataan sumber daya kedepan, bagaimana pemutusan masalah politik dinasti, bagaimana agar pemimpin yang terpilih sesuai harapan

rakyat, sehingga kedepannya setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemimpin daerah dapat berpihak kepada rakyat, terutama rakyat kecil.

Calon yang akan maju melalui pintu partai politik cenderung menjadi sapi perahan dimana partai akan meminta sang calon untuk mempersiapkan dana yang akan digunakan dalam proses pencalonan, hingga kampanye. Ditengah ketidakdewasaan bangsa dalam urusan politik, pemilihan kepala daerah langsung justru menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Didukung dengan tabiat tidak mau kalah, menghalalkan segala cara untuk menang, bukannya perwujudan demokrasi yang ditemui, malah kerusuhan dan perselisihan yang tidak jelas ujung pangkalnya, dan tentu saja konflik horizontal antar pendukung menjadi suatu keniscayaan.

Berpartisipasi atau tidak dalam politik tidak membawa pengaruh apa pun bagi masyarakat. Pengalaman mengecewakan dimana setelah memberikan suaranya, segala janji yang diucapkan pada masa kampanye langsung dilupakan, sehingga masyarakat cenderung memandang politik dari perspektif untung-rugi.

Perspektif untung-rugi ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi jangka pendek, yaitu menanti imbalan materi yang jelas. Sepanjang ada uang, maka masyarakat akan ikut serta dalam kampanye, setelah itu masyarakat akan menunggu apakah calon yang lain berani mengeluarkan uang juga.

Hal ini tentu tidak lepas dari perilaku elit politik dan para calon yang berpikir jangka pendek. Memenangkan pemilihan umum mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, uang bukan masalah yang penting menang. Hingga jika

akhirnya memenangkan pemilihan, kebijakan-kebijakan yang diambil akan semakin jauh dari orientasi kerakyatan, dan sibuk untuk memperkaya diri dan kelompoknya atau membayar utang yang lahir dari proses kampanye.

Proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan, meliputi persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Tahapan pelaksanaan pemilu pada meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1), bahwa "*pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.*"

Masyarakat yang berperan sebagai pemilih memiliki andil besar dalam menyukseskan pilkada serentak dengan menjadi pemilih kritis. Pemilih kritis merupakan pemilih yang selalu mendasarkan pertimbangan kritis pada saat menunaikan hak politik. Menjadi pemilih yang kritis berarti ia harus memastikan bahwa dirinya sudah terdaftar, kemudian mengenali pasangan calon yang akan dipilih baik seputar visi-misi dan program kerja yang diusungnya, serta menyuarakan pilihan pada hari pemungutan suara.

Selain itu, pemilih kritis berarti ia berpikir kritis terhadap program-program dan infrastruktur pendukung program itu yang akan dijabarkan oleh setiap pasangan calon. Program-program yang memang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan perlu didukung agar program-program itu tidak hanya sebagai

aksesori pasangan calon dalam menggaet para pemilih. Program-program yang berpihak pada kebutuhan seluruh rakyat perlu didorong untuk diwujudkan dan ini adalah hak para pemilih untuk janji para pasangan calon jika mereka nantinya terpilih. Hanya dengan partisipasi politik, keputusan politik akan sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia itu sendiri.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa bagaimana berjalannya proses pelaksanaan pesta demokrasi akan dapat mempengaruhi seni memimpin yang dilakukan oleh setiap calon terpilih sebagai kepala daerah dalam perhelatan pilkada.

Pada pilkada Kabupaten Takalar tahun 2017 pasangan calon petahana Bupati Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi usai kalah dalam Pilkada. Pengacara pemohon gugatan, Saiful, menyebut telah terjadi sejumlah kecurangan yang menyebabkan pasangan tersebut kalah berdasarkan rekapitulasi suara KPUD Kabupaten Takalar. Saiful memaparkan ada tiga temuan pelanggaran dalam pilkada di Kabupaten Takalar, yakni pertama, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kedua, terjadi mobilisasi massa yang berasal dari Kabupaten/Kota disekitar Kabupaten Takalar. Dugaan kecurangan ketiga dan yang paling mencolok yaitu ditemukannya 5.486 pemilih yang ada didalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak terdaftar di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Dugaan pelanggaran itu

telah dilaporkan kepanitia pengawas pemilu setempat, namun hingga rekapitulasi dilakukan, kata Saiful, Panwaslu belum memberi tanggapan.

Pasangan Burhanuddin-Natsir yang disusung oleh sembilan partai besar kalah tipis dari pesaingnya, Syamsari-Achmad DG Sere, yang hanya diusung oleh partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Pasangan calon nomor urut 2 tersebut berhasil meraih 88.113 suara atau 50,72 persen. Sementara pasangan Burhanuddin-Natsir meraih 86.090 suara atau 49,82 persen. Selisih suara itu, kata Saiful, menjadi alasan lain pasangan itu mendaftarkan sengketa pilkada ke MK. Pilkada Takalar yang telah selesai, koalisi Nasdem, PKS, dan PKB berhasil menumbangkan koalisi besar pengusung petahana. Keberhasilan tersebut tentu akan menjadi modal besar bagi tokoh partai pengusung untuk maju di pemilihan Gubernur 2018 mendatang. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 'Takalar', Syamsari Kitta-Haji Dede (SK-HD), yang diusung partai Nasdem dan PKS memenangkan pertarungan, selisih tipis dari pasangan petahana yang didukung koalisi besar 10 partai politik (HB-HN).

Pilkada Kabupaten Takalar 2017 tentunya akan menjadi modal untuk nantinya menghadapi pilgub Sulsel 2018 mendatang, namun dari beberapa tokoh yang saat ini melakukan sosialisasi untuk maju di pilgub, seperti Ichsan Yasin Limpo (IYL), Rusdi Masse (RMS) dan calon-calon lainnya. Hanya RMS dinilai paling diuntungkan. Sebagai nahkoda Nasdem di Sulsel yang berhasil memenangkan SK-HD dan sebagai partai pengusung tentu ada deal politik sebelum sepakat mengusung paslon tertentu.

Namun, melihat hasil Pilkada Kabupaten Takalar 2017 kemarin, tokoh yang paling diuntungkan adalah RMS. Siapapun figur yang memenangkan pilkada, tentu parpol pengusung diuntungkan, seperti Nasdem mengusung Syamsari. Siapapun yang diusung Nasdem nantinya pasti Takalar menjadikan salah satu basis. Suryadi mengaku, selain itu koalisi pemenang di Kabupaten Takalar 2017 kemarin akan dengan mudah melanjutkan koalisi di pilgub 2018 nanti, karena hubungan korelasi parpol sudah terjalin. Sebagai kandidat perlu memperkenalkan diri kemasyarakat itu sangat penting. Jangan hanya sekedar wacana atau ekspose di media jika ingin maju bertarung.

Proses Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di kabupaten Takalar 2017 kemarin, berakhir ricuh. Usai pencoblosan, massa pendukung dari pasangan calon Bupati Burhanuddin Baharuddin – HM Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) dan Syamsari Kitta-Achmad Dg.Se're (SK-HD) terlibat bentrokan, Rabu(15/2/2017) sekitar pukul 18.00 WITA. Bentrokan tersebut berawal ketika sejumlah pendukung pasangan SK-HD melakukan konvoi di area basis pasangan Bur-Nojeng di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara Takalar. Dari situ tiba-tiba ada batu yang melayang ke arah pendukung SK-HD. Tak terima diperlakukan seperti itu, alhasil terjadilah sebuah aksi saling lempar batu antara kelompok massa Bur-Nojeng SK-HD. Mendapatkan kabar adanya keributan antara dua pasangan calon Bupati, pihak kepolisian, bersama dengan personal Brimob Polda Sulsel segera kelokasi kejadian. Petugas pun berhasil meredam konflik dan melerasi dua kelompok pendukung yang berseteru.

Pada proses pilkada Takalar tahun 2017, proses kampanye merupakan bagian terpenting dalam menjangkau massa. Kampanye dianggap penting, karena pada tahap ini adalah strategi dari masing-masing tim pemenangan dari tiap kandidat atau kontestan pilkada mulai digulirkan. Hal yang terpenting dalam proses kampanye adalah, menerapkan suatu metodologi kampanye yang kondusif sehingga terhindar dari konflik yang tidak diinginkan.

Di dalam tahapan proses pilkada, sangat penting untuk mengetahui seperti apa strategi masing-masing kandidat dalam memobilisasi massa. Jika mengacu pada pilkada beberapa daerah di Indonesia terdapat gejala konflik akibat dari metode kampanye yang bertentangan dengan UU pilkada. Salah satu praktek kampanye yang berpotensi menimbulkan konflik adalah, kecurangan baik itu kriterianya *money politic*, persoalan independensi KPU, dan lain sebagainya.

Salah satu nama kelurahan yang ada di polombangkeng selatan yaitu kelurahan Patte'ne. Patte'ne adalah salah satu nama kelurahan yang ada di kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Warga masyarakat patte'ne memiliki hubungan tali silaturahmi yang ramah antara saudara kandung maupun bukan, misalnya ada warga yang minta pertolongan disitu ada bantuan tidak memandang status sosial dan kelas sosial. Di samping itu juga warga patte'ne sangat berpartisipasi dalam pembangunan desa seperti pos ronda, jembatan penghubung desasatu dengan desa yang lain. Tidak hanya bantuan materi melainkan bantuan tenaga dan waktu.

Pada saat pilkada Takalar tahun 2017 kemarin, terlihat suatu keadaan yang berubah pasca pilkada. Perubahan itu ditandai dengan disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat khususnya di kelurahan Patte'ne. Penulis memiliki asumsi bahwa dalam proses pilkada tersebut terdapat kejanggalan yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Kejanggalan tersebut bisa berasal dari adanya kampanye yang bertentangan dengan prosedur. Penelitian ini merasa perlu dilakukan untuk mengetahui kebenaran apa yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi, tentunya dengan menggunakan metodologi ilmiah.

Salah satu wacana politik yang menggambarkan situasi dalam proses pilkada atau pemilu pada umumnya adalah hadirnya praktek hegemoni sosial. Hegemoni sosial yang secara sederhana adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak dominan menguasai pihak atau kelompok kecil bertujuan untuk mengakomodir massa dalam memilih kontestan. Pada prakteknya, dalam hegemoni sosial tersebut ada memang yang ditugaskan sebagai orang yang mempengaruhi pemilih sebagai representatif dari seorang kontestan. Orang yang ditugaskan dalam hal tersebut adalah biasanya seorang yang berpengaruh dalam suatu masyarakat seperti tokoh masyarakat yang memenuhi kapasitas dan dipercaya mampu menjalankan tugas tersebut. Dampak atau implikasi dari hegemoni sosial dalam beberapa literature, menjelaskan bahwa hal tersebut bisa memicu terjadinya perdebatan hingga menimbulkan konflik.

Dari latar belakang yang ada diatas, maka penelitian yang akan dilakukan adalah dengan memfokuskan pada bagaimana masyarakat Patte'ne

menjagahubungan kekeluargaannya khususnya pada saat pilkada. Atas dasar itulah maka peneliti sangat tertarik dalam melakukan penelitian tentang “Hegemoni Sosialdalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Masyarakat Patte’ne) Kabupaten Takalar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah untuk mempermudah dan memfokuskan sebuah penelitian. Berikut rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana bentukhegemoni sosial dalam pilkada 2017 masyarakat Patte’ne Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disusun diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Takalar
2. Untuk mengetahui bentuk hegemoni sosial dalam pilkada 2017 masyarakat Patte’ne Kabupaten Takalar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat di kategorikan sebagai manfaat teoritis dan praktis. Secara praktis penelitian ini di harapkan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Peneliti di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu pengetahuan sosial khususnya di lingkup pilkada.

2. Praktis

- a. Untuk pemerintah khususnya KPU untuk berlaku adil dalam pemungutan suara.
- b. Khusus untuk masyarakat pintar-pintarlah untuk memilih calon pemerintah.
- c. Dan untuk peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi dan ilmu pengetahuan.

E. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hegemoni sosial adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa.

2. Pilkada bukan pemilu pada mulanya ditegaskan oleh pembuat undang-undang melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mahkamah Konstitusi kemudian mengoreksi UU tersebut, dan penegasan MK bahwa pilkada adalah pemilu ini kemudian diikuti oleh pembuat undang-undang melalui UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan pertama terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
3. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang saling berhubungan; saling memengaruhi; mempunyai norma-norma; memiliki identitas yang sama; dan memiliki teritorial kewilayahan tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Sejatinya, penyelenggaraan pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik (Marijan, 2010: 83). Sejalan dengan itu, Huntington dan Nelson (1998: 34) juga menyarankan bahwa keterlibatan dibidang politik dalam negara demokrasi memang sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi lebih berarti sebab akan mengakibatkan pemerintah lebih tanggap dan mengembangkan kepribadian individu dalam masyarakat menjadi manusia susila dan warga negara yang bertanggung jawab. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya sebab Pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan pilkada menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan (Marijan, 2010: 113).

1. Konsep Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “eugemonia”. Sebagaimana yang dikemukakan *encyclopedia Britannica* dalam prakteknya di

Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang di klaim oleh negara-negara kota (polism atau citystates) secara individual misalnya yang dilakukan oleh negara Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto, 1993:73).

Jika dikaitkan dengan masa kini, pengertian hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara “pemimpin”. Dalam politik internasional dapat dilihat ketika adanya perang pengaruh pada perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Sovyet yang biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan hegemonik dunia. Adapun teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci adalah:

“Sebuah pandangan hidup dan cara berfikir yang dominan, yang didalamnya sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebahagiaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.”

Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya

dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang harusnya terjadi. Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut: kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan *ideologi*. Masyarakat kelas dominan mereayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

a. Bentuk Hegemoni

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi. (Simon, 2004:9). Cara kekerasan (represif atau dominasi) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya dilaksanakan dengan cara-cara halus, dengan maksud untuk menguasai guna melanggengkan dominasi. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi, tentara, dan hakim. Menurut Gramsci, faktor terpenting sebagai pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi dan politik yang diciptakan penguasa dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuk pola pikir masyarakat. Faktor lainnya adalah pertama paksaan yang dialami masyarakat, sanksi yang diterapkan penguasa, hukuman yang

menakutkan, kedua kebiasaan masyarakat dalam mengikuti suatu hal yang baru dan ketiga kesadaran dan persetujuan dengan unsur-unsur dalam masyarakat.

b. Fungsi Hegemoni

Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan “tidak hanya mengatur” masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual (Storey, 2003:172). Hegemoni diatur oleh mereka yang oleh Gramsci disebut “intelektual organik”. Mereka adalah tokoh moral dan intelektual yang secara dominan menentukan arah konflik, politik, dan wacana yang berkembang di masyarakat. Mereka bekerja untuk melanggengkan kekuasaan atas kelompok yang lemah. Fungsi lain hegemoni yakni, menciptakan cara berfikir yang berasal dari wacana dominan, juga media yang berperan dalam penyebaran wacana dominan itu. Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan tidak hanya mengatur masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual (Storey,2003:172).

c. Keterkaitan Hegemoni dengan Bahasa

Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonik tertentu. Dalam konteks ini tidak ada peluang dan ruang publik bagi agen

masyarakat untuk berbuat lain diluar kerangka ideologi kelompok hegemonik. Mereka adalah tokoh moral dan intelektual yang secara dominan menentukan arah konflik, politik, dan wacana yang berkembang dimasyarakat. Mereka bekerja untuk melanggengkan kekuasaan atas kelompok yang lemah. Berbagai kebijakan negara, misalnya, disampaikan dalam masalah untuk kepentingan bangsa dimasa mendatang, atau demi kemandirian bangsa, telah menghegemoni masyarakat untuk senantiasa menerima berbagai keputusan negara yang merugikan sekalipun. (Eriyanto.2011 analisis wacana, Yogyakarta).

Politik merupakan salah satu sumber utama munculnya konflik di masyarakat. Konflik politik berarti suatu pertarungan yang berkisar pada siapa yang memperoleh sesuatu, kapan ia memperolehnya, dan bagaimana kekuasaan dapat diraih, dipertahankan, dan diperebutkan. Politik adalah seni mengelola kekuasaan. Jadi, konflik politik adalah pertentangan antara dua orang atau lebih yang saling berlawanan dalam rangka untuk memiliki kekuasaan. Defenisi itu menunjukkan dengan jelas bahwa politik merupakan ajang pertarungan dan konflik untuk memperoleh kekuasaan atau pengaruh. Setiap kelompok atau partai politik berusaha memperebutkan suatu kedudukan atau pengaruh. Pada zaman orde lama terjadi konflik partai yang berujung pada pemberontakan G 30 S PKI tahun 1965. Pada masa orde abru, walaupun konflik dapat diredam sementara, setiap kali ada kampanye pemilu

selalu saja terjadi usaha saling mengganggu. Mudah-mudahan pascareformasi ini, masyarakat kita semakin dewasa dalam berpolitik, sehingga politik tidak lagi menjadi sarana konflik keras yang merusak harta benda dan bahkan nyawa.

Sosiologi politik dapat dirumuskan batasannya dengan dua cara. Pertama, sosiologi politik dirumuskan batasannya sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang didalamnya terjadi interaksi sosial, dengan politik. Dalam hubungan tersebut, bisa dilihat bagaimana masyarakat memengaruhi politik. Juga sebaliknya, bagaimana politik memengaruhi masyarakat. Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti diatas, maka sosiologi politik mengkaji masyarakat, yang didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan politik.

Hubungan dilihat dalam sisi saling pengaruh memengaruhi. Selanjutnya, bagaimana politik memengaruhi masyarakat, yang didalamnya ada proses interaksi sosial? Ketika suatu keputusan politik telah ditetapkan dan disahkan menjadi undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum, misalnya Undang-undang tentang pemerintah daerah, maka keputusan politik tersebut akan memengaruhi masyarakat, termasuk orang atau kelompok orang yang menciptakan keputusan tersebut.

Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Dalam zaman ini kekuasaan itu ialah negara. Betapa besar peranan negara

dalam pembentukan hukum, terutama bagi negara-negara yang hukum positifnya didasarkan atas sistem kodifikasi, kiranya sudah umum diketahui. Negara membentuk, menjalankan dan mempertahankan hukum. Begitu besar peranan negara melalui pembentuk undang-undangnya (badan legislatif) sehingga terdapat aphorisme bahwa pembentuk undang-undang dapat melakukan semua dan segala-galanya, kecuali merubah jenis kelamin laki-laki menjadi wanita. Tidak berlebih-lebihan kiranya jika dikatakan bahwa hukum positif senyatanya adalah hukum buatan negara, “hukum negara”.

Negara hukum di Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Dengan merujuk pada unsur-unsur Negara hukum yang telah dikemukakan diatas, ditemukan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa Negara hukum Indonesia yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan. *Pertama* pengakuan dan perlindungan hak

asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945; *kedua*, pemencaran kekuasaan negara, yang berbentuk pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertical. Pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal tampak pada pembentukan dan pemberian kekuasaan kepada DPR (pasal 19,20, 21, 22 UUD 1945), kekuasaan presiden (pasal 4 sampai 15 UUD 1945), kekuasaan kehakiman (pasal 24 UUD 1945), dan beberapa suprastruktur politik lainnya. *Ketiga*, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2); “*kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”; *keempat*, penyelenggaraan Negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *kelima*, pengawasan yang oleh hakim yang merdeka, yang merupakan implementasi dari pasal 24 UUD 1945 dan beberapa undang-undang organik tentang kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan; *keenam*, pemilihan umum yang dilakukan secara periodik; *ketujuh*, tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya administratif, PTUN, dan Komisi Ombudsman.

2. Pilkada

Pemilihan kepala daerah disingkat pilkada tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum hanya karna pemilihan kepala daerah tidak disebutkan dalam pasal yang menyangkut pemilu, yaitu pasal 22E UUD 1945 khususnya ayat (2). Dari sini muncullah ungkapan yang “aneh” yaitu “rezim pemilu” dan

“rezim pemerintahan”. Disebut sebagai ungkapan aneh karena dalam pembendaharaan ilmu politik ataupun ilmu pemerintahan tidak dikenal kedua ungkapan tersebut. Kedua ungkapan tersebut tidak dikenal karena keduanya tidak dapat dipisahkan: bentuk pemerintahan menentukan metode penentuan kepala pemerintahan. Bentuk pemerintahan parlementer mengharuskan kepala pemerintahan dipilih dari dan oleh anggota parlemen. Bentuk pemerintahan presidensial menetapkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum.

Pilkada bukan pemilu pada mulanya ditegaskan oleh pembuat undang-undang melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mahkamah Konstitusi kemudian mengoreksi UU tersebut, dan penegasan MK bahwa pilkada adalah pemilu ini kemudian diikuti oleh pembuat undang-undang melalui UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi, pemerintah dan DPR kemudian membuat keputusan yang justru lebih jauh memisahkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Disebut lebih menjauhkan karena gubernur, bupati, dan walikota tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan dipilih langsung oleh DPRD. Sebelum disetujui oleh DPR, RUU ini sudah ditolak oleh berbagai kalangan dalam masyarakat. Bagi masyarakat, gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih secara langsung oleh rakyat karena baik presiden maupun anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat. UU ini justru semakin ditolak oleh

berbagai kalangan (LSM, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan organisasi profesi) dari seluruh Indonesia.

Negara Indonesia hanya satu tetapi memiliki sistem pemilihan yang berbeda. Susunan negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan otonomiseluas-luasnya kepada Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Bentuk pemerintahan yang ditetapkan oleh UUD 1945 adalah pemerintahan presidensial, sehingga presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sebagai manifestasi dari pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan berdasarkan otonomi seluas-luasnya, UUD 1945 menetapkan DPRD dan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) sebagai institusi yang mengatur dan mengurus otonomi daerah. Bahkan UUD 1945 sudah menetapkan keanggotaan DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Mengapa pemilihan kepala daerah tidak dikategorikan sebagai pemilu? Selain mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya berperan menafsirkan konstitusi berdasarkan arsitektur dan pasal-pasal UUD sehingga tidak saja memberi kejelasan, tetapi juga kepastian hukum.

Perubahan pola pemerintahan daerah yang sentralistik menjadi desentralistik telah membawa pergeseran locus dan focus kekuasaan dari pusat ke daerah, termasuk perluasan kewenangan politik pada tingkat local. Akan tetapi semangat desentralisasi tersebut masih belum diimbangi oleh tumbuhnya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi substantive,

masyarakat kita masih memahami dan memaknai demokrasi sebagai formalisme sistem, berupa penempatan demokrasi procedural sebagai tujuan akhir. Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dan Daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Pasal 56 Undang-Undang NO 32 Tahun 2004, sebagai landasan yuridis formal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menyebutkan bahwa:*Pertama*, Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*Kedua*, Pasangan calon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain dimasyarakat. Hubungan timbal

balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Dalam sudut pandang Isin, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi seperti aspek kedamaian, konflik, kesesuaian atau bertentangan dengan norma merupakan bagian esensial pula dari telaah yang dilakukan oleh sosiolog hukum.

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.

Fenomena sosial tentang hukum adalah gejala empirik yang dapat disaksikan oleh pancaindera kita. Berbagai kasus atau perkara yang terjadi di tanah air, baik itu yang bersifat lokal, nasional bahkan internasional (selama berhubungan dengan kasus yang ada di Indonesia) dapat dijadikan rujukan analisis kasus. Kemampuan individu untuk mengakses kasus sangat berpengaruh pada kesempurnaan data yang didapat. Semakin sumber data (primer, sekunder, dan tersier) banyak didapatkan maka tidak menutup kemungkinan penguasaan atas kasus semakin mendalam pula. Oleh sebab itu, dalam tataran diskusi akan terlihat sejauh mana kemampuan seseorang mendalami kasus yang dibahas.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang saling berhubungan; saling memengaruhi; mempunyai norma-norma; memiliki identitas yang sama; dan memiliki teritorial kewilayahan tertentu. Hendropuspito memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai unsur-unsur masyarakat untuk membedakannya dengan beberapa istilah lain seperti komunitas, perkumpulan dan lain sebagainya:

a. Adanya Kelompok Manusia yang Berinteraksi

Syarat pertama yang harus ada dalam kehidupan masyarakat adanya interaksi di antara anggota kelompok masyarakat tersebut, berlangsung lama, saling memengaruhi dan memiliki prasarana untuk berintegrasi.

b. Adanya norma-norma dan Adat Istiadat

Kehidupan suatu masyarakat akan berlangsung tertib manakala di situ terdapat norma-norma yang diterapkan secara kontinyu dan teratur, sehingga menjadi suatu adat istiadat yang khas untuk masyarakat tersebut yang menjadi pembeda dengan masyarakat lainnya.

c. Adanya Identitas yang Sama

Unsur lain yang membentuk masyarakat adalah adanya identitas yang sama yang dimiliki oleh warga masyarakatnya, bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan manusia lainnya.

5. Analisis Teori

a. Teori Oligarki

Penjelasan Aristoteles mengenai varian dan tipe pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah, dan motif elit yang duduk di struktur pemerintah, yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat Yunani, merupakan salah satu penjelasan awal yang membahas asal muasal pengetahuan pada terma oligarki, disamping penjelasan Aristoteles lainnya yang mengkaji soal demokrasi.

Perbedaan oligarki dan demokrasi menurut Aristoteles bertumpu pada dialektika aktor dengan berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, dan juga dengan motif politik yang dibawakan berdasarkan preferensi masing-masing. Bila oligarki kental dengan aroma kekuasaan pada segelintir minoritas kaya dengan motif untuk mempertahankannya, sedang demokrasi merupakan kekuasaan oleh kalangan marjinal yang menyimpan motif untuk bisa mensejajarkan diri bersama-sama secara egaliter, baik antara kalangan kaya maupun miskin, baik keluarga sultan maupun rakyat biasa, baik masyarakat kota maupun masyarakat pedalaman. Agar seluruhnya turut serta menggenggam hak-hak politik, kebebasan berserikat, berpendapat, memilih dan dipilih, serta mengajukan aspirasi perundang-undangan.

Sejarah oligarki merupakan sejarah yang identik dengan dua hal, pertama oligarki menandakan superioritas orang berpunya, kedua oligarki identik dengan bagaimana sepak terjang mereka di dunia politik dalam

posisinya sebagai elit. Dalam perkembangannya, teorisasi soal oligarki dalam kacamata ekonomi politik perlahan lahan mulai bias dan bercampur aduk dengan teori elit yang banyak diilhami lewat karya-karya Mosca. Bila menurut pada pengertian awal oligarki, dimana para ilmuwan politik bersandar pada definisi Aristoteles, ada poin-poin yang terabaikan saat mereka memahami *sekel oligarki* yang dimaksudkan oleh filsuf tersebut. Bagi Winters para ilmuwan politik hanya terfokus pada pengertian kuantitas aktor yang berperan memerintah saja “satu orang, sedikit orang, atau banyak orang”. Dari jalur inilah akhirnya Winters memulai kerangka konseptual oligarki yang lebih rinci. Poin pokok lain dari kesimpulan kepemilikan material atas hak milik adalah bahwa ketidaksetaraan material berdampak pada ketidaksetaraan politik.

Hal ini sepadan dengan apa yang dikatakan oleh De Laveleye: “Para filsuf dan pembuat hukum zaman dulu tahu benar, berdasarkan pengalaman, bahwa kemerdekaan dan kesetaraan politik hanya bisa ada ketika didukung kesetaraan kondisi”. Orang-orang kaya dengan harta yang melimpah bisa melakukan apapun demi terwujudnya cita-cita dan tujuan politik mereka. Dengan bekal material yang lebih besar dibandingkan yang lain, selain mendapatkan kedudukan eksklusif dimata masyarakat, mereka pun memiliki wewenang yang besar karena posisinya. Sulit untuk membayangkan bahwa orang-orang tidak menaruh hormat pada macam orang jenis ini.

Dengan kekayaan material melimpah, ketimpangan politik sangat terasa. Apalagi bila praktek ini dilihat dinegara-negara yang belum mapan secara demokrasi, dimana demokrasi masih berjalan dalam batasan-batasan prosedural seperti yang dikatakan oleh Schumpeter, ditambah penegakan hukum yang hanya berupa semboyan semata. Maka sangat kentara sekali jurang pemisahannya. Oligark- melalui arus finansial mereka – mampu membayar aparat hukum, menyewa milisi, menyewa massa, memanipulasi hasil pemilu, dan menyuap masyarakat untuk memilih mereka. Maka satu-satunya jalan menghilangkan ketimpangan politik yang disebabkan oleh ketidaksetaraan material bagi Winters adalah dengan melakukan pola redistribusi kekayaan atau dengan menghilangkan sekat ketidakmerataan material.

b. Teori konflik

Teori konflik berpandangan bahwa masyarakat pada umumnya mempunyai banyak kelompok yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, bahkan seringkali bertentangan, dan kelompok yang terkuat dalam masyarakat mempunyai kekuasaan untuk mendefinisikan nilai-nilai kelompok-kelompok yang lemah sebagai menyimpang. Para pendukung teori ini menekankan adanya represi pihak yang lemah oleh pihak yang kuat, adanya eksploitasi orang banyak oleh kelompok elite yang berkuasa secara ekonomi dan politik, dan penggunaan kekuasaan oleh kelompok kaya dan berpengaruh untuk mengembangkan dan menegakkan standar-

standar demi melindungi kepentingan mereka. Sebagian pendukung teori ini berpendapat bahwa situasi seperti itu dalam masyarakat modern disebabkan oleh adanya dominasi kelas, sedangkan kelas yang lain berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh sistem kapitalisme yang tidak adil.

Akomodasi adalah suatu interaksi sosial yang dilakukan antara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik. Ada beberapa macam bentuk akomodasi, berikut ini adalah penjelasan singkatnya:

1. Arbitrase; merupakan suatu pengendalian atau penyelesaian konflik yang menunjuk pihak ketiga untuk memutuskan konflik atau pertentangan tersebut. Dalam bentuk ini, pihak yang bertikai berusaha untuk mencari pihak ketiga untuk mengendalikan konflik tersebut.
2. Mediasi; merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan melalui suatu jasa perantara yang bersikap netral. Pada mediasi, terdapat pihak yang berusaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai antara dua belah pihak.
3. Koersi; merupakan pengendalian konflik yang dilakukan dengan tindakan kekerasan. Sehingga, konflik tersebut tidak diselesaikan dengan cara damai tetapi dengan cara keras. Misalkan konflik antara masyarakat atas dan bawah yang saling bertikai dan pada akhirnya segerombolan masyarakat lain berusaha untuk melakukan tindakan

anarkhis di antara salah satu anggota masyarakat tersebut misalnya dengan cara memukuli salah satu anggota masyarakatnya.

4. **Konsiliasi**; merupakan suatu pengendalian konflik dengan cara melalui lembaga tertentu. Pada bentuk ini, lembaga tertentu melakukan persetujuan pada kedua pihak yang bertikai sehingga tidak terulang kembali konflik tersebut. Misalkan, telah terjadi konflik pada ketua RT daerah Petukangan dengan ketua RT daerah Tangerang mereka berdua saling bertutur kata dengan cara mengakui dirinya sendiri siapa yang paling hebat diantara mereka berdua. Karena saling mengakui kehebatannya itu dan tidak mau kalah, maka timbul lah konflik diantara mereka berdua. Kemudian, untuk diselesaikannya, lembaga masyarakat meminta persetujuannya dari kedua pihak yang bertikai tadi agar konflik dapat reda. Lembaga masyarakat itulah yang disebut lembaga tertentu.
5. **Ajudikasi**; merupakan suatu pengendalian konflik yang diselesaikan dengan cara pengadilan atau diselesaikan di pengadilan. Pada bentuk ini, telah terjadi konflik yang terjadi antara dua belah pihak, kemudian pihak tersebut memilih untuk menyelesaikan konfliknya di pengadilan. Misalkan, Pak Ahmad dan Pak Ridwan sedang berbincang - bincang tentang masalah pekerjaan yang sedang dijalaninya. Kemudian, telah terjadi tidak persetujuan antara Pak Ahmad dan Pak Ridwan dalam

bertutur kata, sehingga timbul lah konflik maka mereka berdua memutuskan untuk meredakan konflik tersebut di pengadilan.

6. Kompromi; Kompromi merupakan suatu persetujuan yang dilakukan dengan cara perdamaian untuk saling bersama-sama mengurangi tuntutan. Misalkan, Pedagang mie ayam melakukan protes terhadap pedagang gado-gado bahwa penghasilan yang di dapat oleh pedagang gado-gado lebih banyak dari pada pedagang mie ayam. Di karenakan yang paling laku terjual adalah pedagang gado-gado. Sehingga, pedagang mie ayam tidak setuju melihat hal itu, kemudian kedua pedagang tersebut saling marah-marahan dalam berbicara. Pada akhirnya, salah satu warga yang sedang membeli, melakukan persetujuan diantara mereka dengan cara damai untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berusaha untuk saling mengurangi tuntutan mereka berdua.
7. Toleransi; Toleransi merupakan suatu sikap saling menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam bentuk ini, masyarakat harus saling menghargai satu sama lainnya. Apa yang dianutnya, apa yang dipercayainya, dan sebagainya. Sebagai contoh, Pekerja kantoran selama ini telah berteman baik dengan seorang yang beragama Islam. Pada suatu saat ia di PHK dan terpaksa mencari pekerjaan baru. Setelah ia mendapatkan pekerjaan baru tersebut, tak lama ia saling akrab dan sudah mulai terbiasa berinteraksi dengan

teman-teman barunya. Pada suatu ketika ia mendapatkan teman dekat, lama kelamaan mereka menjadi bersahabat. Pada saat hari raya Natal ia berjalan-jalan dengan keluarga di pagi hari, tak lama diperjalanan ia melihat sahabatnya itu ingin memasuki gereja. Ia mulai tau bahwa sahabatnya bergama non muslim yaitu beragama Kristen. Disitu ia mempertemukan sahabatnya dan saling menyapa. Itulah yang disebut toleransi, jadi kita harus menghargai perbedaan dalam masyarakat. Kita boleh bergaul antara berbeda agama tetapi, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan agama karena hukumnya musyrik.

8. Stalamete; Stalamete merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan yang seimbang di antara kedua pihak yang bertikai. Sehingga, pertikaian tersebut terhenti pada titik tertentu.

6. Penelitian Relevan

Leli Salman (2011), telah melakukan penelitian dengan judul Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Langsung “Sebuah Pilihan Model Pemerintahan Daerah Demokratis”. Sejak reformasi pemerintahan digulirkan, wajah politik lokal telah mengalami penataan ulang, pergeseran paradigma dan terobosan sistem yang cukup progresif bahkan hampir melebihi amanat konstitusinya. Pilihan untuk menerapkan model pemerintahan daerah demokratis telah mendorong political will dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung. Dimana esensi demokrasi pada

tingkat lokal didasarkan pada prinsip local choice and local voice, karena itu sebagai suatu keniscayaan dari upaya penguatan legitimasi pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Harapan terbesar adalah pemilihan kepala daerah secara langsung akan berkolerasi positif dengan pembangunan demokratisasi pada tingkat lokal.

Cucu Sutrisno (2017), melakukan penelitian dengan judul Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena Pilkada yang demokratis harus disertai baiknya kondisi partisipasi politik warga negara. Kenyataannya, partisipasi politik dalam pilkada masih banyak terkontaminasi oleh persoalan mendasar yang perlu dicarikan solusi penyelesaiannya. Oleh karena itu, pada artikel ini akan dibahas mengenai partisipasi politik warga negara untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis.

B. Kerangka Konsep

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati. Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan,

pelayanan publik, dan pembangunan. Dalam kontestasi pilkada kabupaten Takalar tahun 2017 lalu, ada satu kegiatan yaitu kampanye. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, kampanye bisa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

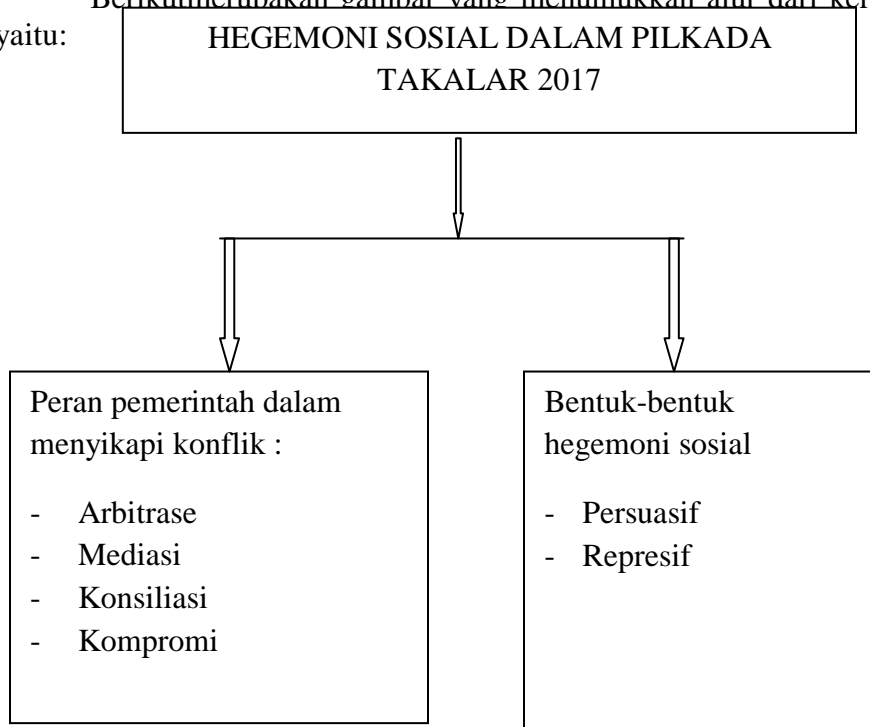
Dalam situasi kampanye tersebut khususnya di kelurahan Patte'ne, penulis menyoroti adanya proses hegemoni sosial. Bentuk hegemoni sosial merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang harusnya terjadi. Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut: kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan *ideologi*. Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Terdapat dua bentuk hegemoni sosial dalam politik yaitu persuasif dan represif. Cara kekerasan (represif atau dominasi) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasifnya dilaksanakan dengan cara-cara halus, dengan maksud untuk

menguasai guna melanggengkan dominasi. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparaturnegara seperti polisi, tentara, dan hakim.

Pelaksanaan pesta demokrasi di Takalar seperti pada umumnya terjadi disintegrasi dalam masyarakat. Perpecahan tersebut adalah gambaran dinamika politik oleh karena terbentuknya sekte-sekte atau dalam agenda politik tersebut terdapat timses-timses yang pada dasarnya memiliki kepentingan berbeda. Hal tersebutlah kemudian melahirkan konflik karena adanya tindakan profokatif yang dilakukan oleh timses dari paslon 2. Konflik tersebut ditangani cepat oleh lembaga kepolisian polsek Polongbangkeng Selatan dengan mengamankan pihak yang bermasalah.

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan alur dari kerangka konsep yaitu:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai pembinaan pegawai fungsional serta masalah-masalah yang ditemukan serta jalan keluarnya dalam rangka tercipta optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena tujuan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. Data-data tersebut lebih banyak bercerita mengenai hegemoni sosial sehingga penelitian dapat tercapai dengan baik. Studi kasus yang dimaksud adalah suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dilakukan peneliti dalam meneliti permasalahan ini adalah Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang terlibat dalam pokok masalah dan fokus penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dalam pelaksanaan pilkada. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya: Informan penelitian yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Teknik pengambilan informan yang digunakan peneliti adalah *Purposive Sampling* yaitu dengan memilih secara langsung informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti seperti memiliki pemahaman sosial yang baik dan mengerti banyak tentang pilkada. Menunjukkan perilaku positif berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat setempat. Target penelitian yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini betul-betul pada Kelurahan Patte'ne tersebut.

Informan Sesuai dengan Pokok masalah dan fokus Penelitian saya tentang Hegemoni sosial dalam Pemilihan kepala daerah, Maka yang akan menjadi subjek

dalam Penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Bupati antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

| No. | Informan | Jumlah | RM 1 | RM 2 |
|-----|---------------------------|---------|--|--|
| 1. | Personal KPU | 1 Orang | Bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Takalar? | Bagaimana bentuk hegemoni sosial dalam pilkada 2017 masyarakat Patte'ne Kabupaten Takalar? |
| 2. | Kepala dan Staf Kelurahan | 2 Orang | | |
| 3. | Masyarakat Setempat | 3 Orang | | |

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah dalam penelitian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan fokus penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur yang mengikuti pola pikir yang *empirical induktif*. Fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi fokus atau titik perhatian dalam penelitian ini adalah; (Nurhaeni, 2016)

1. Peran pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada

Dalam tahun politik seperti pada umumnya sering kali terjadi konflik, konflik tersebut biasanya terjadi antar timses dari masing-masing kandidat. Dalam kasus tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara kontestasi memiliki peran dan tanggung jawab besar di dalam menyikapi konflik tersebut. Berikut ini langkah-langkah yang diambil sebagai akomodasi konflik:

- a. Arbitrasi; merupakan suatu pengendalian atau penyelesaian konflik yang menunjuk pihak ketiga untuk memutuskan konflik atau pertentangan tersebut
- b. Konsiliasi; merupakan suatu pengendalian konflik dengan cara melalui lembaga tertentu. Pada bentuk ini, lembaga tertentu melakukan persetujuan pada kedua pihak yang bertikai sehingga tidak terulang kembali konflik tersebut.
- c. Mediasi; merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan melalui suatu jasa perantara yang bersikap netral.
- d. Kompromi; merupakan suatu persetujuan yang dilakukan dengan cara perdamaian untuk saling bersama-sama mengurangi tuntutan.

2. Bentuk hegemoni sosial dalam pilkada

Di dalam pilkada terdapat suatu kegiatan yang dinamakan kampanye. Kampanye adalah suatu kegiatan menghegemoni massa atau kegiatan mempengaruhi massa. Pada dasarnya yang berperan penting disini adalah timses

dan partisipan dari masing-masing kandidat. Terdapat dua bentuk hegemoni sosial, yaitu :

- a. Hegemoni sosial represif; cara kekerasan (represif atau dominasi) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi.
- b. Hegemoni sosial persuasif; cara persuasifnya dilaksanakan dengan cara-cara halus, dengan maksud untuk menguasai guna melanggengkan dominasi.

E. Instrumen Penelitian

Melakukan penelitian berarti orang tersebut sedang berusaha untuk mengumpulkan informasi dan data. Pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan menganalisis data yang sudah diperoleh. Dalam memperoleh informasi atau data dari sebuah penelitian, tentu kita membutuhkan sebuah alat untuk mengumpulkan semua informasi yang kita inginkan. Alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam sebuah penelitian selanjutnya kita sebut dengan instrument penelitian.

Instrumen dapat juga diartikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data mengenai kualitas maupun kuantitas sebuah objek ukur. Menurut Sukmadinata (2010:230) instrument penelitian adalah berupa tes yang bersifat mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan pernyataan yang alternative jawabannya memiliki standard jawaban tertentu, benar salah maupun

skala jawaban. Instrument yang berisi jawaban skala, berupa pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif ataupun skala garis”.

Instrumentasi dalam sebuah penelitian kegiatan meneliti atau mengamati pasti tidak akan pernah lepas dengan data hasil penelitian. Data hasil penelitian diperoleh peneliti dengan menggunakan berbagai macam metode. Metode pengumpulan data merupakan suatu langkah penting dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh inilah yang nantinya digunakan untuk pengujian atau analisis. Kualitas data yang diperoleh akan sangat berpengaruh pada siapa nara sumbernya, bagaimana dan dengan cara atau alat apa data itu diperoleh atau dikumpulkan. Sumber data yang diperoleh dari sebuah penelitian dibedakan menjadi dua macam data. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari nara sumbernya.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak ke tiga, atau data ini sudah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal melakukan analisis data. Data yang diperoleh baik merupakan data primer maupun data sekunder, dalam pengumpulan atau pengukurannya selalu menggunakan alat pengukur yang lazim disebut dengan instrumen. Instrumen merupakan segala macam alat bantu yang digunakan peneliti untuk memudahkan dalam pengukuran variabel. Pengukuran data dengan variabel eksak, kita dapat menggunakan instrumen yang sudah tersedia dan sudah terstandarisasi, misalnya barometer, tachometer, thermometer, timbangan dan lain sebagainya. Tetapi untuk variabel yang lebih bersifat abstrak dan kompleks (misalnya konsep) masih sangat jarang ditemukan

instrumen yang standart. Apabila sebuah penelitian dihadapkan pada pengukuran mengenai kepuasan konsumen, motivasi, loyalitas dan yang semacam itu, maka peneliti harus mendesain (membuat) instrumen yang dapat mengukur tingkat kepuasan loyalitas dan lain yang disebutkan tadi dengan menggunakan berbagai macam alat instrumen seperti angket, kuesioner sehingga tujuan untuk mendeskripsikan yang dapat dipenuhi.

Sebelum memilih instrumen atau bahkan mendesain instrumen, perlu dilihat terlebih dahulu mengenai metode apa yang akan kita gunakan dalam mengumpulkan data, apakah observasi, wawancara, kuesioner, atau dokumentasi. Untuk lebih memahami instrumen apa yang harus digunakan dalam sebuah penelitian, berikut sekilah mengenai beberapa metode dalam pengumpulan data. Ditinjau dari cara atau metode pengumpulan ini, yaitu seperti angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Instrument atau alat pengumpulan datanya juga berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Tujuan penyebaran angket ialah untuk mencari sebuah informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Disamping itu, responden mengetahui informasi tertentu yang diminta.

Instrument (alat ukur) penelitian dapat berupa kuesioner, cek list yang digunakan sebagai pedoman observasi dan wawancara atau angket. Dalam suatu

penelitian alat pengumpul data atau instrumen penelitian akan menentukan data yang dikumpulkan dan menentukan kualitas penelitian. Menurut Ir. Syofyan Siregar, M.M (2011:161) instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Untuk dapat dikatakan instrumen penelitian yang baik, paling tidak harus memenuhi kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas.

Kuesioner menurut Arikunto (2010: 194) merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian terhadap pilkada dan hegemoni sosial ini, peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka.

F. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, seperti hasil observasi, partisipatif, dokumentasi serta wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa hasil telaah buku referensi serta hasil dokumen yang berkaitan dengan hegemoni sosial dan dinamika politik dalam pilkada. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian.

Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data adalah parainforman yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

a. Data Primer

Kata-kata dan tindakan dari orang yang diwawancarai atau yang diamati merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini diambil dari data tertulis, rekaman, atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data ini melalui wawancara dan pengamatan serta merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengarkan dan bertanya. Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan pada subjek penelitian dicatat sebagai data utama ditambah dengan hasil pengamatan dari tindakan subjek penelitian di Kelurahan Pate'ne.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan

hegemoni sosial dan dinamika politik yang terjadi di kabupaten Takalar.

Sumber data tertulis atau dokumen diperoleh dari kantor KPU.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini dalam mendapatkan data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam observasi partisipasi, pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Pengamat ikut sebagai peserta. Dalam peserta non partisipasi pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan sebagai pengamat dan tidak ikut dalam kegiatan. Kedua jenis observasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan observasi partisipatif adalah responden yang diamati tidak mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi sehingga situasi dan kegiatan berjalan secara wajar tidak ada yang dibuat-buat. Namun, dalam melakukan observasi partisipatif, pengamat harus bekerja dua kali selain ikut serta dalam setiap kegiatan, pengamat juga sekaligus melakukan pengamatan dan hal ini yang membuat pengamat menjadi lupa dengan tugas penelitiannya karena terlalu fokus dalam kegiatan yang

diikutinya. Pada observasi non partisipatif, pengamat dapat lebih focus dalam mengamati. Namun, karena responden mengetahui kehadiran seorang peneliti yang sedang melakukan pengamatan, maka perilaku atau kegiatan responden yang diamati bisa menjadi kurang wajar karena dibuat-buat.

Seperti halnya wawancara, sebelum melakukan pengamatan sebaiknya peneliti menyiapkan pedoman dalam melakukan observasi. Dalam penelitian kualitatif, pedoman observasi ini hanya berupa garis besar atau butir-butir umum kegiatan yang akan diobservasi. Rincian dari aspek-aspek yang diobservasi dikembangkan di lapangan dalam proses pelaksanaan observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara (Hadeli, 2006). Sedangkan menurut Nasution (2003:113), wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pengumpulan data menggunakan wawancara ini lebih sering digunakan dalam sebuah penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang

biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian (Cresswell, 2008). Sebagai keuntungan wawancara dikemukakan antara lain adalah (Nasution, 2003:125): Dapat memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya tentang suatu masalah, khususnya yang berkenaan dengan pribadi seseorang. Cepat memperoleh informasi yang diinginkannya. Dapat memastikan bahwa respondenlah yang member jawaban. Dalam angket kepastian ini tidak ada. Dapat berusaha agar pertanyaan yang diajukan benar-benar dapat dipahami oleh responden.

Wawancara memungkinkan fleksibilitas dalam cara-cara bertanya. Bila jawaban tidak memuaskan, tidak tepat atau tidak lengkap, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan lain. Pewawancara yang sensitif dapat menilai validitas jawaban berdasarkan gerak-gerak, nada, dan ekspresi tubuh responden. Informasi yang diperoleh melalui wawancara akan lebih dipercaya kebenarannya salah tafsiran dapat diperbaiki sewaktu wawancara dilakukan. Jika perlu pewawancara dapat lagi mengunjungi responden bila masih perlu penjelasan. Dalam wawancara responden lebih bersedia mengungkapkan keterangan-keterangan yang tidak diberikannya dalam angket tertulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan atau semua data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung dengan foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Langkah-langkah penyusunan Instrumen Penelitian Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji secara teoritik tentang substansi yang akan diukur. Peneliti harus menentukan defenisi konseptual kemudian definisi operasional. Selanjutnya definisi operasional ini dijabarkan menjadi indikator dan butir-butir.

4. Partisipatif

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Pengamatan ini mempunyai maksud bahwa pengumpulan data melibatkan interaksi sosial antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan dalam satu lokasi, selama pengumpulan data berlangsung harus dilakukan secara sistematis tanpa menempatkan diri sebagai peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Pengertian Analisis Data Kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti.

Tujuan Analisis Data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Dalam model ini terdapat komponen pokok yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak

penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

3. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

4. Penarikan Simpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proposal sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

I. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu factor yang sangat penting, karena tanpa pengabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka peneliti sulit untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya. Dalam hal pengabsahan data, peneliti menggunakan metode *triaagulasi* yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triagulasi Teknik

Triagulasi teknik dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mencari data serta informasi melalui teknik yang berbeda. Seperti awal mula

mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik observasi karena peneliti merasa bahwa teknik observasi belum sepenuhnya memberikan data atau informasi yang diperlukan. Maka dari itu, peneliti kembali mengumpulkan data dengan teknik wawancara, untuk memastikan lebih jelasnya data atau informasi yang konkrit maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan meminta data kepada pihak desa yang juga memiliki peran penting dan pengetahuan lebih pada hal yang terjadi pada warganya. Kemudian peneliti ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang diamati, maka peneliti menggunakan teknik partisipatif, dalam pengumpulan data ini juga sangat membantu memberikan informasi atau data karena peneliti melakukan pengamatan secara dekat.

2. Triagulasi Waktu

Triagulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mencari data melalui wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Seperti awal melakukan pengumpulan data atau mengumpulkan informasi pada pagi hari tetapi karena ingin menguji kebenaran maka dilakukan lagi pengumpulan data pada siang hari, karena ingin lebih memastikan jawaban responden maka peneliti kembali mengumpulkan data pada malam hari terhadap responden yang tidak benar atau tidak sesuai dengan realitas yang ada, maka dilakukan wawancara kedua, karena ingin memastikan lagi atau lebih memperjelas lagi penjelasan yang dipaparkan oleh responden pada saat wawancara pertama dan

kedua maka peneliti kembali melakukan wawancara ketiga. Ketika wawancara pertama, kedua dan ketiga semua sama berarti itulah data atau informasi yang sebenarnya atau sesuai dengan realitas, begitupun sebaliknya.

3. Triagulasi Sumber Data

Triagulasi sumber data hampir sama dengan triagulasi waktu tetapi yang membedakan dalam triagulasi sumber data wawancara dilakukan hanya sekali saja sedangkan dalam triagulasi waktu wawancara dilakukan secara berulang-ulang kali. Dalam triagulasi sumber data ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada setiap responden, selanjutnya data atau informasi yang diperoleh dari responden harus dikaitkan dengan teori yang digunakan.

J. Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

| Kegiatan | Bulan ke- | | | | | |
|--------------------|-----------|----|-----|----|---|----|
| | I | II | III | IV | V | VI |
| Pengajuan Judul | | | | | | |
| Survey Pendahuluan | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | | |
| Penelitian | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Penyusunan Hasil Penelitian | | | | | | |
| Seminar Hasil | | | | | | |

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Takalar Sebagai Daerah Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Februari 1960, proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra MAKASSAR bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), dan Jeneponto.

Onder afdeling Takalar membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar dilakukan bersama, antara pemerintah, politisi dan tokoh-tokoh masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu:

a. Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar.

Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat)

orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H Dewakang Dg Tiro, Daradda Dg Ngambe, Abu Dg Mattola, dan Abd Mannan Dg Liwang.

- b. Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H Makaraeng Dg Manjarungi, Bostan Dg Mamajja, H Mappa Dg Temba, H Achmad Dahlan Dg Sibali, Nurung Dg Tombong, Sirajuddin Dg Bundu, dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.

Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No 2 Tahun 1957) maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibukotanya Jeneponto. Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H Mannyingarri Dg Sarrang dan Bapak Abd.Mannan Dg Liwang sebagai ketua DPRD.

Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 (dua) kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar, berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor

74 Tahun 1959), tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan di mana Kabupaten Takalar termasuk di dalamnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Pebruari 1960, terbentuklah kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H Donggeng Dg. Ngasa seorang Pamongpraja Senior.Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai Ibukota Kabupaten Takalar.Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan tanggal 10 februari 1960 sebagai hari jadi Kabupaten Takalar.

Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu, Bupati Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dibantu oleh 4 (empat) orang Badan Pemerintahan Harian (BPH), dengan personalianya yaitu:

- a. BPH Tehnik & Keamanan : H Mappa Dg Temba
- b. BPH Keuangan : Bangsawan Dg Lira
- c. BPH Pemerintahan : H Makkaraeng Dg Manjarungi
- d. BPH Ekonomi : Bostan Dg Mamajja

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polombangkeng dijadikan 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara. Districk Galesong dijadikan 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa,

District Takalar, District Laikang dan District Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibukota). Terakhir, dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).

Sehingga dengan demikian sampai sekarang Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Kesembilan kecamatan ini membawahi sejumlah 76 desa dan 24 kelurahan, dengan jumlah penduduk 275.034 jiwa. Sejak terbentuknya Kabupaten Takalar hingga saat ini, pejabat Bupati Kepala Daerah silih berganti, demikian pula Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masing-masing yaitu:

BUPATI KEPALA DAERAH :

Donggeng Dg Ngasa, masa Jabatan 1960-1964.

Makkatang Dg Sibali, masa Jabatan 1965-1967.

M Suaib Pasang, masa Jabatan 1967-1978.

Ibrahim Tulle, masa Jabatan 1968-1983.

Batong Aminullah, masa Jabatan 1983-1987.

Drs H Tadjuddin Nur, masa Jabatan 1987-1992.

Drs H Syahrul Saharuddin,MS, masa Jabatan 1992-1997.

Drs H Zainal Abidin MSi, masa Jabatan 1997-2002.

Drs H Ibrahim Rewa MM, masa Jabatan 2002-2007.

DR H Ibrahim Rewa MM, masa Jabatan 2007-2012.

DR H Burhanuddin Baharuddin SE MSi masa Jabatan 2012 – 2017.

WAKIL BUPATI :

Drs H M Said Pammusu MSi, masa Jabatan 1999-2002.

Drs A Makmur A Satta MM, masa Jabatan 2002-2007.

Drs A Makmur A Satta MM, masa Jabatan 2007-2012.

H M Natsir Ibrahim MM, masa Jabatan 2012-2017

KETUA DPRD :

H A Dahlang Dg Sibali, masa Jabatan 1966-1970.

Ashar Mangung, masa Jabatan 1970-1971.

H Halollang Adam BA, masa Jabatan 1971-1977.

Hasbuddin Muntu, masa Jabatan 1977-1982.

H ABD Wahab Dg Ngerang, masa Jabatan 1982-1987.

H Semming Benu, masa Jabatan 1987-1992.

Drs Sirajuddin Lopo, masa Jabatan 1992-1997.

Tjardiman, masa Jabatan 1997-1999.

Drs H Ibrahim Rewa MM, masa Jabatan 1999-2002.

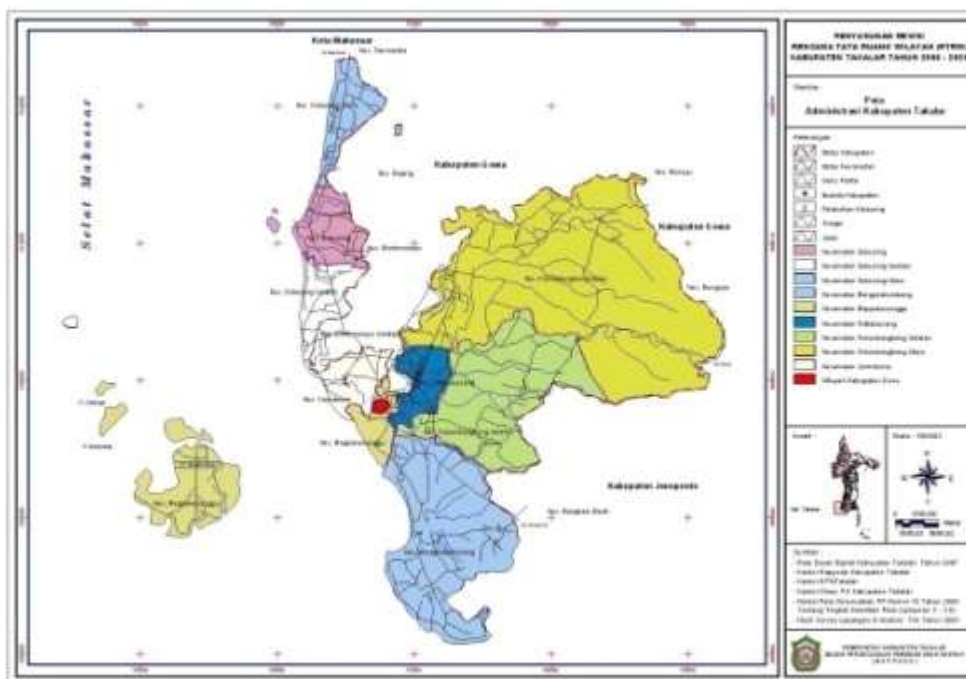
Drs H Napsa Baso, masa Jabatan 2003-2004 dan 2004-2009

Drs H Abd Majid Makaraeng MM, masa Jabatan 2009-2014

H Djabir Bonto, masa jabatan 2014-2019

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Takalar secara geografis terletak antara 5,3 – 5,38 Lintang Selatan dan 119,02 – 119,39 Bujur Timur. Berikut ini adalah gambar peta kabupaten Takalar:



Gambar: Peta Kabupaten Takalar

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Batas-batas wilayah kabupaten Takalar

| | |
|---------|--|
| Utara | Kota Makassar dan Kabupaten Gowa |
| Selatan | Laut Flores |
| Barat | Selat Makassar |
| Timur | Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa |

Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 7 kecamatan, 55 desa, dan 18 kelurahan. Dari 7 kecamatan tersebut, 4 kecamatan merupakan daerah pesisir, yaitu Mangarabombang dengan luas 100,50 km² terdiri dari 12 desa, Mappakasunggu dengan luas 74,63 km² terdiri dari 8 desa, Galesong Selatan luas 44,00 km² dan 14 desa, Galesong Utara luas 21,75 km² terdiri dari 9 desa. Tiga kecamatan lainnya adalah Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan luas 88,07 km² terdiri dari 8 desa / kelurahan, Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan luas 212,25 km² terdiri dari 14 desa / kelurahan, dan Kecamatan Pattallassang dengan luas 25,31 km² terdiri dari 8 Desa / Kelurahan.

3. Topografi, Iklim dan Hidrologi

Topografi keadaan wilayah kabupaten takalar terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0–25 m, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan basal.

Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 buah sungai, yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha.

Berkaitan dengan iklim, dari data yang peneliti peroleh dari stasiun cuaca Takalar menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kondisi cuaca yang tidak begitu bervariasi, dimana rata-rata curah hujan 2086 mm/thn dengan intensitas tertinggi pada bulan Januari yaitu 585 mm dan terendah pada bulan Agustus yaitu 24 mm dengan suhu rata-rata tahunan 23°C - 33°C. Sedangkan secara hidrologis Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Nopember hingga bulan Mei. Rata-rata curah hujan bulanan pada musim hujan berkisar antara 11,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah hujan tertinggi rata-rata harian adalah 27,9oC (Oktober) dan terendah 26,5oC (Januari – Februari). Temperatur udara terendah rata-rata 22,2 hingga 20,4oC pada bulan Februari – Agustus dan tertinggi 30,5 – 33,9oC pada bulan September – Januari.

4. Kondisi Demografi

Dalam analisis demografi penduduk, mencakup mengenai jumlah, umur, dan jenis kelamin menjadi dasar pijakan. Jumlah penduduk akan menggambarkan permasalahan yang mungkin ada, sementara itu jumlah dan jenis kelamin berkaitan dengan berbagai karakteristik penduduk. Penduduk Kabupaten Takalar selama lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 0,57 persen pertahun, yaitu dari 235.188 jiwa pada Tahun 1999 menjadi 240.578 jiwa pada Tahun 2003 (Susenas 1999, 2003). Penduduk daerah ini tersebar di tujuh kecamatan, pada Tahun 2003 dengan jumlah penduduk 240.578 jiwa sekitar 14,06 persen di Kecamatan Mangarabombang, 10,77 persen di Mappakasunggu, 10,03 persen di Polongbangkeng Selatan, 12,42 persen di

Pattallassang, 17,04 persen di Polongbangkeng Utara, 18,68 persen di Galesong Selatan, dan 16,99 persen di Galesong Utara.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Takalar dengan luas wilayah yang tetap maka tingkat kepadatan penduduk juga semakin bertambah. Pada Tahun 2003 rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar sekitar 425 orang per km². Jika diperhatikan menurut Kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Galesong Selatan yang paling banyak dan paling padat penduduknya dengan rata-rata kepadatan sekitar 2.066 orang per km², sedangkan yang paling sedikit penduduknya Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan kepadatan 274 orang per km², dan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Pattallassang sebagai ibukota Kabupaten Takalar dengan kepadatan 141 orang per km². Rendahnya kepadatan penduduk di ibukota kabupaten ini merupakan indikator bahwa penduduk yang tinggal di kecamatan ini terkonsentrasi hanya di wilayah kota saja.

Kabupaten Takalar dengan jumlah penduduk 240.578 jiwa mempunyai jumlah penduduk miskin sejumlah 50.912 jiwa, atau 21,16% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin tersebut terbagi dalam 15.228 KK. Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk termiskin (16.625 jiwa) diikuti oleh Mangarabombang (13.525 jiwa), Galesong Utara (7.952 jiwa), Polongbangkeng Selatan (6.770 jiwa), Pattallassang (6.636 jiwa), dan terkecil pada Mappakasunggu (4.148 jiwa).

B. Deskripsi Khusus Kelurahan Patte'ne

1. Sejarah Singkat Kelurahan Patte'ne

Kelurahan Patte'ne, berdiri pada tahun 1991 sebagai persiapan kelurahan Patte'ne dari hasil pemekaran kelurahan Maradekaya sebagai induk yang diperkasai oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para tokoh pemuda sekelurahan Patte'ne. Para tokoh tersebut adalah sebagai berikut :

- a. H. Kr. Dg. Sibali (Almarhum)
- b. H. Abdul Rahman (Almarhum)
- c. H. Nyimpung Dg. Se're (Almarhum)
- d. Pangewa Dg. Sese (Almarhum)
- e. H. Nuruddin Dg. Lurang (Almarhum)

Sejak berdirinya kelurahan Patte'ne adapun pemimpin yang diberi amanah oleh pemerintah kabupaten Takalar yaitu :

- a. H. Abdul Hamid Mandja Dg. Jorre
- b. Alimuddin Dg. Lawa, S.Ip
- c. H. Abdul Salim, S.Sos
- d. M. Arifin Yakop
- e. Djalaluddin H. SE., M.Ap
- f. Syafaruddin S.Sos, M.Ap

2. Batas-batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah kelurahan Patte'ne yaitu :

Sebelah utara kelurahan Patte'ne berbatasan dengan desa Moncongkomba

Sebelah selatan kelurahan Patte'ne berbatasan dengan kelurahan Pappa

Sebelah timur kelurahan Patte'ne berbatasan dengan kelurahan Bulukunyi

Sebelah barat kelurahan Patte'ne berbatasan dengan kelurahan Maradekaya

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aspek yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi manusia. Mata pencaharian di berbagai daerah tidak semuanya sama, itu sangat tergantung pada kondisi geografi dan topografi. Di kelurahan Patte'ne, seperti yang dipaparkan diatas memiliki mata pencaharian yang variatif. mata pencaharian tersebut mencakup PNS, Petani, Buruh bangunan, Peternak dan IRT. Dari kesemuanya itu menurut pengamatan penulis masyarakat di kelurahan Patte'ne lebih dominan petani.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Seperti yang dipaparkan di atas, masyarakat di kelurahan tersebut memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Menurut pengamatan bahwa masyarakat di keluraha tersebut sebagian besar adalah petani. Berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat setempat beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan kondisi sosial ekonomi tersebut tentu dengan melihat aspek-aspek seperti IPM ataupun kesejahteraan masyarakat yang membaik dari tahun ke tahun.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Patte'ne kecamatan Polobangkeng Selatan kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif yang memberikan gambaran dan informasi mengenai hegemoni sosial dalam pilkada.

Pada BAB ini peneliti akan menyajikan data-data hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu di kelurahan Patte'ne dengan melibatkan beberapa informan yakni kepala Lurah, Personil KPUD Takalar, dan masyarakat setempat. Informan tersebut yang memberikan informasi yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 dan bentuk hegemoni sosial dalam pilkada tahun 2017 masyarakat Patte'ne kabupaten Takalar

1. Peran Pemerintah dalam Menyikapi Konflik pada Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Takalar

Dalam rangkaian proses penelitian ini dimana salah satunya adalah kegiatan observasi lapangan dengan didasarkan pada pengamatan, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pada penyelenggaraan pilkada kemarin sempat terjadi keributan antar tim pendukung masing-masing kandidat”.

Berdasarkan pengamatan di atas, realitas politik seperti ini bukan sesuatu hal yang baru akan tetapi hal tersebut sudah menjadi bagian dari dinamika politik selama

berlangsungnya kontestasi. Realitas politik tersebut terjadi karena adanya suatu kondisi perbedaan arah dukungan sehingga potensi pertentangan antar masing-masing tim pendukung sangat besar apalagi jika terjadi tindakan profokatif yang mengarah pada konflik.

“Pada saat konflik berlangsung, pihak kepolisian setempat meringkus anggota yang bertikai dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan”.

Dalam penyelenggaraan pemilu, pihak kepolisian seperti tugas dan fungsinya bekerja sama dengan pihak BAWASLU untuk turun aktif memantau jalannya pilkada. Tindakan seperti yang dipaparkan di atas adalah upaya kepolisian dalam mengamankan pelaku yang bermasalah dengan proses hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang hokum positif.

Berangkat dari latar belakang bahwa penyelenggaraan pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Idealnya, Pemilu dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi dikarenakan hasil pemilu menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat jika diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan informan SM (52 Tahun) :

“beginie saya sudah beberapa kali memilih mulai usia 19 tahun sampainya sekarang setiap akan diadakan pemilihan gubernur, walikota, DPRD, ataupun bupati” (Hasil wawancara, 17 Juli 2018).

Berkaitan dengan pengalaman masyarakat setempat sebagai pemilih tetap dalam pemilu, informan SS (55 Tahun) menyampaikan hal berikut :

“saya berapa kalimi melakukan pemilihan di kampung baik itu pemilihan legislatif seperti DPR dan DPRD maupun eksekutif seperti pilpres, pilgub dan wali kota atau bupati” (Hasil wawancara, 17 Juli 2018).

Dari informasi yang disampaikan oleh beberapa informan di atas yang notabeneanya merupakan individu-individu yang sudah mengikuti pemilihan baik itu legislatif maupun eksekutif. Dari informasi yang disampaikan di atas juga bahwa umumnya sesuai UU pemilu yang mengikuti pemilihan umum adalah sesuai dengan persyaratan usia yang sudah ditetapkan dalam UU.

Perubahan pola pemerintahan daerah yang sentralistik menjadi desentralistik telah membawa pergeseran lokus dan fokus kekuasaan dari pusat ke daerah, termasuk perluasan kewenangan politik pada tingkat lokal. Akan tetapi semangat desentralisasi tersebut masih belum diimbangi oleh tumbuhnya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi substantif, masyarakat kita masih memahami dan memaknai demokrasi sebagai formalisme sistem, berupa penempatan demokrasi prosedural sebagai tujuan akhir. Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dan Daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Dalam konteks pilkada Takalar, seperti dipaparkan pada BAB sebelumnya yaitu sudah beberapa kali melakukan pergantian Bupati dan Wakil Bupati tentu dengan mengikuti mekanisme UU pilkada. Berikut ini kutipan wawancara dengan Pak Lurah Patte'ne SF (55 Tahun):

“Sekarang ini terhitung sejak puluhan tahun lalu kita sudah melangsungkan pola desentralisasi yaitu adanya pemilihan seperti bupati dan wakil bupati secara demokratis” (Hasil wawancara, 17 Juli 2018).

Kemudian informan RK (25 Tahun), menyampaikan hal berikut terkait dengan pilkada Takalar :

“Pemilihan bupati takalar sudah dilakukan pergantian 11 kali sampai dengan saat ini” (Hasil wawancara 18 Juli 2018).

Dari hasil wawancara di atas, seperti yang disinggung oleh salah satu informan SF (55 Tahun) yakni desentralisasi. Desentralisasi seperti yang dipaparkan di atas dengan ditetapkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah suatu perubahan kebijakan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Tentu dalam perubahan kebijakan tersebut adalah melalui pengkajian-pengkajian mendalam oleh lembaga terkait. Kabupaten Takalar yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulsel, dari informasi yang disampaikan oleh RK (25 Tahun) sudah dilakukan pergantian kepala daerah sebanyak 11 kali. Perubahan kedudukan dalam jabatan tersebut tentu

adalah alasan baik itu periodisasi ataupun oleh karena terdapat pelanggaran seperti KKN.

Sesuai dengan fokus masalah penelitian yakni peran pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 kabupaten Takalar, menyoroti fenomena di lapangan bahwa memang pilkada kurang lebih satu tahun lalu menggambarkan suatu situasi disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat. Berikut ini pernyataan DN (48 Tahun) personal KPU :

“Pada pilkada Takalar tahun 2017 khususnya di kelurahan Patte’ne masyarakat berpecah belah. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan kepentingan, ada pihak yang mendukung paslon 1 juga terdapat paslon 2. (Hasil wawancara 17 Juli 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik dalam pilkada ataupun pemilu pada umumnya memang sering berpotensi konflik. Konflik tersebut jika melihat faktornya dalam pendekatan teori konflik adalah karena perbedaan pendapat ataupun juga perbedaan kepentingan. Kemudian DG (45 Tahun) staf kelurahan Patte’ne menambahkan :

“Konflik tersebut di Patte’ne diselesaikan melalui jalur hukum dengan melibatkan pihak kepolisian setempat. Menurut kronologisnya konflik tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat setiap warga yang ada di masyarakat Patte’ne. dan juga ada sekelompok warga yang melakukan konvoi atas kemenangan paslon 2 mereka di area basis lawannya padahal belum ada keputusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)” (Hasil wawancara, 17 Juli 2018).

Dari pernyataan informan di atas konflik tersebut merupakan bagian dari dinamika politik, informan SF (55 Tahun) menambahkan :

“Setelah kedua pihak yang bermasalah tersebut di bawa ke kantor kepolisian, menurut informasinya masalah tersebut diselesaikan secara baik-baik atau kedua pihak saling memaafkan” (Hasil wawancara, 17 Juli 2018).

Dari pernyataan informan di atas, faktor yang melatarbelakangi konflik adalah pihak timses atau partisipan dari paslon 2 melakukan pesta dengan tajuk kemenangan sehingga menimbulkan suhu politik panas dan akhirnya terjadi konflik. Tindakan dari timses tersebut dinilai profokatif karena mereka melakukannya di area basis timses 1. Penyelesaian konflik tersebut melibatkan aparat kepolisian polsek Polongbangkeng Selatan. Mengacu pada bentuk-bentuk akomodasi, penyelesaian konflik tersebut dikategorikan akomodasi konsiliasi. Salah satu informan SM (52 Tahun) menambahkan:

“Bagaimana tidak konflikki, mereka dari timses paslon 2 datang kesini sementara disini adalah basis dari timses paslon 1. Kedatangan mereka disini sarat dengan bentuk profokatif apalagi dalam kegiatan tersebut mereka berteriak dengan mengatakan paslonnya menang padahal kita ketahui belum ada keputusan dari lembaga tinggi yang mengesahkan seperti pernyataan mereka” (Hasil wawancara, 20 Juli 2018).

Mengutip teori konflik, bahwa masyarakat pada umumnya mempunyai banyak kelompok yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, bahkan seringkali bertentangan, dan kelompok yang terkuat dalam masyarakat mempunyai kekuasaan untuk mendefinisikan nilai-nilai kelompok-kelompok yang lemah sebagai menyimpang. Para pendukung teori ini menekankan adanya represi pihak yang lemah oleh pihak yang kuat, adanya eksploitasi orang banyak oleh kelompok elite yang berkuasa secara ekonomi dan politik, dan penggunaan kekuasaan oleh kelompok kaya dan berpengaruh untuk mengembangkan dan menegakkan standar-standar demi

melindungi kepentingan mereka. Jadi konflik di atas adalah dalam tahun politik pilkada Takalar tahun 2017 masyarakat membentuk sekte atau pembagian kelompok masyarakat berdasarkan dukungan terhadap masing-masing paslon. Jika dihubungkan dengan teori konflik hal tersebut adalah realitas sosial yang menggambarkan situasi masyarakat dengan kepentingan yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut kemudian melahirkan konflik dengan motif ego kelompok partisipan dari masing-masing paslon. Kemudian SF (55 Tahun) menambahkan :

“Dalam kampanye di Patte’ne cenderung menimbulkan kontroversi seperti kecurangan. Menurut laporan warga terdapat timses yang melakukan hegemoni sosial seperti ditawarkan ini itu dan semacamnya” (Hasil wawancara, 17 Juli 2018)

Dari wawancara tersebut memang dalam tahun politik terdapat satu kegiatan yang merupakan rangkaian proses demokrasi tersebut yaitu kampanye. Di dalam kampanye kegiatannya adalah meliputi sosialisasi politik dalam konteks ini adalah memperkenalkan paslon kepada konstituen atau masyarakat pemilih. Dalam kegiatan tersebut juga tidak sekedar menyampaikan identitas paslon saja melainkan ada hal substansial yang disampaikan di dalamnya yakni sosialisasi visi misi serta program kerja yang digagas oleh paslon dalam melakukan perubahan seperti kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Dari rangkaian proses kampanye juga seperti yang terlihat bahwa suhu politik kian memanas sehingga sangat berpotensi konflik.

Dari realitas politik dalam kontestasi pilkada Takalar khususnya di kelurahan Patte’ne terjadi konflik antar timses dari masing-masing kandidat. Konflik tersebut menurut hemat penulis adalah dinamika politik yang memang sering kali mewarnai

proses demokrasi. Dalam penanganan konflik tersebut, pemerintah melakukan penyelesaian konflik melalui pihak polisi dan merupakan suatu bentuk akomodasi konsiliasi.

2. Bentuk Hegemoni Sosial Pada Pilkada Tahun 2017 Masyarakat Patte'ne Di Kabupaten Takalar

Berdasarkan pemikiran Gramsci dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang harusnya terjadi. Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan *ideologi*. Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Berikut ini hasil pengamatan yang berkaitan dengan hegemoni sosial dalam pilkada Takalar di Patte'ne:

“hegemoni sosial menurut pengamatan peneliti di perankan oleh tokoh atau figur yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan di dalam mempengaruhi konstituen ”.

Mengacu pada definisi hegemoni yaitu upaya mempengaruhi, dalam konteks pilkada sangat lumrah dalam politik. Hegemoni sosial adalah bagian lain dari kegiatan kampanye atau dengan kata lain bisa dikategorikan kampanye hitam

khususnya pada kasus di atas. Mekanisme yang dipakai adalah mendikte konstituen dengan cara-cara yang tidak demokratis atau bersifat paksaan, tentu saja realitas politik seperti ini adalah cacat atau melanggar konstitusi.

Dari latar belakang teori hegemoni sosial yang dicetus oleh Gramsci tersebut, untuk mengetahui realitasnya dalam fenomena politik tahun 2017 di Takalar, peneliti mewawancarai DL (70 Tahun) dan berikut pernyataannya :

“Saya didatangi oleh DS untuk memilih paslon nomor 2 dengan iming-iming seekor sapi atau dengan uang 5 juta rupiah” (Hasil wawancara, 21 Juli 2018).

Masih berkaitan dengan praktek hegemoni sosial di atas, berikut ini wawancara dengan informan DL (70Tahun) :

“Saya didatangi oleh si DS subuh-subuh, perihal kedatangannya adalah untuk mempengaruhi saya sebagai pemilih tetap untuk memilih paslon 2. Dia menjanjikan sapi dan uang tunai jika paslon 2 memenangkan kontestasi” (Hasil wawancara, 21 Juli 2018).

Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan realitas hegemoni sosial tersebut, salah seorang informan AY (45 Tahun) menambahkan :

“Bagaimana tidak tergiur, masyarakat dijanjikan dengan hal seperti itu. Saya pribadi mengikuti atau menyepakati permintaan tersebut. Saya diminta serahkan foto copy KK dan saya penuhi” (Hasil wawancar 24 Juli 2018).

Dari keterangan wawancara beberapa informan di atas, bisa dikatakan bahwa realitas hegemoni sosial yang terjadi dalam tahun politik 2017 lalu khususnya di kelurahan Patte'ne terdapat kecurangan yang terorganisir. Sangat jelas sekali bahwa, timses dari paslon 2 tersebut memiliki sebuah sistem yang di dalamnya terdapat pembagian struktur peran dan fungsi seperti salah satunya di atas adalah DS (45

Tahun) mendatangi rumah konstituen atau masyarakat pemilih untuk dipengaruhi dan memilih paslon 2. Sejatinya, penyelenggaraan pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik (Marijan, 2010: 83). Berkaitan dengan strategi kemenangan tersebut, informan SM (52 Tahun) menyampaikan hal berikut :

“Ini saya kira sudah menjadi rahasia umum, kecurangan seperti memanfaatkan kekayaan dan lain sebagainya. Cara seperti ini yang diterapkan oleh paslon 2, menurut saya adalah bagian yang berperan penting dalam kemenangannya kemarin” (Hasil wawancara, 25 Juli 2018).

Dari wawancara di atas dengan menggunakan pendekatan teori oligarki bahwa sejarah oligarki merupakan sejarah yang identik dengan dua hal, pertama oligarki menandakan superioritas orang berpunya, kedua oligarki identik dengan bagaimana sepak terjang mereka di dunia politik dalam posisinya sebagai elit. Dalam perkembangannya, teorisasi soal oligarki dalam kacamata ekonomi politik perlahan lahan mulai bias dan bercampur aduk dengan teori elit yang banyak diilhami lewat karya-karya Mosca. Bila menurut pada pengertian awal oligarki, dimana para ilmuwan politik bersandar pada definisi Aristoteles, ada poin-poin yang terabaikan saat mereka memahami *sekel oligarki* yang dimaksudkan oleh filsuf tersebut. Bagi Winters para ilmuwan politik hanya terfokus pada pengertian kuantitas aktor yang berperan memerintah saja “satu orang, sedikit orang, atau banyak orang”. Dari jalur inilah akhirnya Winters memulai kerangka konseptual oligarki yang lebih rinci. Poin pokok lain dari kesimpulan kepemilikan material atas hak milik adalah bahwa

ketidaksetaraan material berdampak pada ketidaksetaraan politik. Jadi dalam fenomena hegemoni sosial tersebut adalah sarat dengan dimotori oleh hal-hal material. Masyarakat didikte dengan konsep-konsep yang dalam perspektif hukum adalah tidak demokratis.

Bentuk hegemoni sosial memiliki proporsi yaitu terdapat kelompok dominan dan kelompok kecil. Terkait hal tersebut, informan AS (45 Tahun) dalam suatu kesempatan wawancara menyampaikan :

“Dalam pandangan saya, timses paslon 2 memiliki banyak partisipan atau pengikut, baik itu yang ada di masyarakat maupun juga dalam struktural birokrasi. Sehingga kombinasi keduanya saling mengikat dan menghasilkan suatu kekuatan politik yang besar” (Hasil wawancara, 26 Juni 2018).

Kemudian masih berkaitan dengan bentuk hegemoni sosial di atas, peneliti berusaha mencari tau dengan mempertanyakan netralitas pemerintah atau PNS dan berikut wawancara dengan informan AS (45 Tahun) :

“Kalau masalah netralitas, menurut hemat saya bahwa lembaga pemerintah seperti KPUD dengan alatnya seperti panwas dan sebagainya tidak netral. Fenomena kecurangan itu ada, hanya saja tidak diproses dengan adil” (Hasil wawancara, 26 Juli 2018).

Dari beberapa informan tersebut bisa disimpulkan dengan kekayaan material melimpah, ketimpangan politik sangat terasa. Apalagi bila praktek ini dilihat dinegara-negara yang belum mapan secara demokrasi, dimana demokrasi masih berjalan dalam batasan-batasan prosedural seperti yang dikatakan oleh Schumpeter, ditambah penegakan hukum yang hanya berupa semboyan semata. Maka sangat kentara sekali jurang pemisahannya. Oligarkimelalui arus finansial mereka mampu membayar aparat hukum, menyewa massa, memanipulasi hasil pemilu, dan menyuap masyarakat untuk

memilih mereka. Maka satu-satunya jalan menghilangkan ketimpangan politik yang disebabkan oleh ketidaksetaraan material bagi Winters adalah dengan melakukan pola redistribusi kekayaan atau dengan menghilangkan sekat ketidakmerataan material.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa hegemoni sosial dalam pemilihan kepala daerah kabupaten takalar khususnya pada masyarakat patte'ne sangatlah dinamis. Dalam ruang lingkup tersebut, ada dua hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 dan bentuk hegemoni sosial dalam pilkada tahun 2017 masyarakat Patte'ne kabupaten Takalar. Kedua hal pokok tersebut berikut ini dibahas secara mendalam.

1. Peran Pemerintah dalam Menyikapi Konflik pada Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Takalar

Mengacu pada hasil observasi dan wawancara bahwa dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Takalar tahun 2017 lalu menampilkan wajah politik yang dinamis. Hal tersebut didukung oleh realitas fenomena politik hadirnya praktek hegemoni sosial yang ditunggangi kepentingan politik. Menurut hemat penulis tindakan tersebut merupakan bagian penting strategi memenangkan kontestasi pilkada dan dalam penerapannya sangatlah sistemik dan terorganisir. Dalam suasana politik yang memanas tersebut melahirkan perpecahan sehingga cenderung konflik.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan

jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan; 2010: 1-2).

Dari pendekatan teori konflik bahwa memang dalam masyarakat yang beragam cenderung berpotensi konflik. Konflik di patte'ne adalah realitas sosial yang memberikan penjelasan bahwa memang nyata perbedaan pendapat atau kepentingan melahirkan konflik..Menyoroti fenomena politik pada pilkada Takalar tahun 2017 kemarin, diperoleh penjelasan bahwa dalam masyarakat terdapat pembagian sekte-sekte atau dalam tahun politik biasanya dibentuk timses dari masing-masing paslon. Kampanye kita ketahui bersama merupakan bagian dari rangkaian proses demokrasi, ia menjadi ruang bagi masing-masing paslon untuk mempengaruhi konstituen atau masyarakat pemilih. Kampanye di atur dalam UU pemilu dengan prosedur-prosedur yang jelas dan untuk dipatuhi. Kegiatan kampanye dalam konteks pilkada Takalar sarat dengan pelanggaran atau kecurangan dan terjadi tindakan profokatif yang memecahbelah masyarakat. Menurut informasi dari masyarakat setempat terdapat konflik yang dilatarbelakangi oleh timses paslon 2 yang melakukan pesta bertajuk kemenangan di wilayah basis paslon 1. Tindakan tersebut memicu kemarahan timses 1 sehingga terjadi konflik. Penyelesaian konflik tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengikuti kaidah-kaidah hokum.

Akomodasi adalah suatu interaksi sosial yang dilakukan antara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik. Ada beberapa macam bentuk akomodasi, yaitu arbitrase, mediasi, koersi, konsiliasi, adjudikasi, kompromi, toleransi, dan stalamete. Dalam konteks dinamika politik di kabupaten Takalar khususnya di kelurahan Patte'ne, konflik tersebut diselesaikan melalui konsiliasi yaitu melibatkan lembaga politik dengan mempertemukan kedua pihak yang berkonflik dengan bertujuan kedua pihak tersebut bisa kembali akur.

Politik merupakan salah satu sumber utama munculnya konflik di masyarakat. Konflik politik berarti suatu pertarungan yang berkisar pada siapa yang memperoleh sesuatu, kapan ia memperolehnya, dan bagaimana kekuasaan dapat diraih, dipertahankan, dan diperebutkan. Politik adalah seni mengelola kekuasaan. Jadi, konflik politik adalah pertentangan antara dua orang atau lebih yang saling berlawanan dalam rangka untuk memiliki kekuasaan. Definisi itu menunjukkan dengan jelas bahwa politik merupakan ajang pertarungan dan konflik untuk memperoleh kekuasaan atau pengaruh.

Terelepas dari hingar bingar pesta demokrasi yakni pilkada di Takalar, bahwa pemilu merupakan pelembagaan konflik politik dalam rangka merebut dan mempertahankan kekuasaan yang jumlahnya terbatas itu. Sebab, dalam Negara yang aplikasikan demokrasi liberal seperti di Indonesia ini hasil pemilu sebuah alat guna memberikan pengakuan secara sah kepada pemerintahan yang berkuasa. Oleh sebab

itu sangatlah krusial untuk melihat pemilu dari kaca mata konflik, sebab baik adanya kecurangan ataupun pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu.

Proses demokratisasi di Indonesia yang berjalan pasca reformasi ini memang masih dimaknai oleh sebagian daripada masyarakat adalah kebebasan berekspresi. Makna “kebebasan” inilah banyak yang mengartikan dapat berbuat semuanya. Padahal demokrasi memiliki hokum dan moral untuk meredam kebebasan yang dimaknai sebeb-bebasnya. inilah dasarr perlunya manajemen konflik dalam momentum tahun politik tersebut agar kebebasan itu tidak kelewat batas. Dalam manajemen konflik itu perlu diperhatikan mengenai dua hal utama pada saat pilkada yakni bentuk ancaman dan bentuk pengendalian terhadap ancaman.

Disini pentingnya membangun kesadaran mengenai bentuk pengendalian konflik. Apabila merujuk aspek keamanan dan ketertiban maka tugas utama ini diemban kepolisian Republik Indonesia untuk mengendalikan berbagai kemungkinan yang hadir pada kontestasi pilkada tersebut. Sebab, polri dalam masyarakat demokratis menjalani dua peran ganda yakni sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara ketertiban. Sebab konflik dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang dihindari akan tetapi konflik merupakan bagian daripada demokrasi itu sendiri. Sebuah pemahaman mengenai upaya penanganan konflik harus dibangun. Ruang-ruang perbedaan ini memang diberikan keterbukaan akan tetapi perbedaan itu jangan sampai membuat perpecahan, penting kemudian menyelesaikan konflik politik ini dengan cara-cara yang lebih humanis.

2. Bentuk Hegemoni Sosial dalam Pilkada Tahun 2017 Masyarakat Patte'ne Kabupaten Takalar

Adapun teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci adalah:“Sebuah pandangan hidup dan cara berfikir yang dominan, yang didalamnya sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebahagiaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.”

Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang harusnya terjadi. Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut: kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan *ideologi*. Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Dalam konteks fenomena politik yakni hegemoni sosial di Patte'ne bahwa hal tersebut dilakukan dengan sangat struktural. Untuk mencapai tujuan politik salah satu

paslon menerapkan suatu sistem hegemoni sosial dengan melibatkan structural seperti tingkat kelurahan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat didoktrin dengan menawarkan hal-hal materi seperti menjanjikan memberi uang dan hal-hal materi lainnya. Banyak masyarakat tergiur dan jatuh dalam perangkap politik yang tidak demokratis.

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi. (Simon, 2004:9). Cara kekerasan (represif atau dominasi) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya dilaksanakan dengan cara-cara halus, dengan maksud untuk menguasai guna melanggengkan dominasi. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparaturnegara seperti polisi, tentara, dan hakim. Menurut Gramsci, faktor terpenting sebagai pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi dan politik yang diciptakan penguasa dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuk pola pikir masyarakat. Faktor lainnya adalah pertama paksaan yang dialami masyarakat, sanksi yang diterapkan penguasa, hukuman yang menakutkan, kedua kebiasaan masyarakat dalam mengikuti suatu hal yang baru dan ketiga kesadaran dan persetujuan dengan unsur-unsur dalam masyarakat.

Mengacu pada pernyataan informan bahwa bentuk hegemoni dalam realitasnya adalah dikategorikan persuasif. Menurut hemat penulis bahwa bentuk hegemoni sosial tersebut condong pada perilaku persuasif dengan sikap pragmatis

yang ditunjukkan adalah seperti menghadiahkan uang dan binatang peliharaan.Ini menunjukkan bahwa perilaku yang memang sifatnya persuasif terkesan memaksa atau memaksa untuk mengharuskan.Dalam fenomena politik tidak etis tersebut masyarakat pemilih cenderung mengikuti dan menghilangkan asas-asas penting dalam berdemokrasi.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian hegemoni sosial pada pilkada tahun 2017 di kabupaten Takalar khususnya masyarakat Patte'ne dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah dalam menyikapi konflik pilkada tahun 2017 di kabupaten Takalar

Mengacu pada hasil observasi dan wawancara bahwa dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Takalar tahun 2017 lalu menampilkan wajah politik yang dinamis. Hal tersebut didukung oleh realitas fenomena politik hadirnya praktek hegemoni sosial yang ditunggangi kepentingan politik. Menurut hemat penulis tindakan tersebut merupakan bagian penting strategi memenangkan kontestasi pilkada dan dalam penerapannya sangatlah sistemik dan terorganisir. Dalam suasana politik yang memanas tersebut melahirkan perpecahan sehingga cenderung konflik.

Menyoroti fenomena politik pada pilkada Takalar tahun 2017 kemarin, diperoleh penjelasan bahwa dalam masyarakat terdapat pembagian sekte-sekte atau dalam tahun politik biasanya dibentuk timses dari masing-masing paslon. Kampanye kita ketahui bersama merupakan bagian dari rangkaian proses demokrasi, ia menjadi ruang bagi masing-masing paslon untuk mempengaruhi konstituen atau masyarakat pemilih. Kampanye di atur dalam UU pemilu dengan prosedur-prosedur yang jelas dan untuk dipatuhi. Kegiatan kampanye dalam konteks pilkada Takalar sarat dengan

pelanggaran atau kecurangan dan terjadi tindakan profokatif yang memecahbelah masyarakat. Menurut informasi dari masyarakat setempat terdapat konflik yang dilatarbelakangi oleh timses paslon 2 yang melakukan pesta bertajuk kemenangan di wilayah basis paslon 1. Tindakan tersebut memicu kemarahan timses 1 sehingga terjadi konflik. Penyelesaian konflik tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengikuti kaidah-kaidah hukum. Dalam konteks dinamika politik di kabupaten Takalar khususnya di kelurahan Patte'ne, konflik tersebut diselesaikan melalui konsiliasi yaitu melibatkan lembaga politik dengan mempertemukan kedua pihak yang berkonflik dengan bertujuan kedua pihak tersebut bisa kembali akur.

2. Bentuk hegemoni sosial dalam Pilkada Tahun 2017 Masyarakat Patte'ne Kabupaten Takalar

Dalam konteks fenomena politik yakni hegemoni sosial di Patte'ne bahwa hal tersebut dilakukan dengan sangat struktural. Untuk mencapai tujuan politik salah satu paslon menerapkan suatu sistem hegemoni sosial dengan melibatkan structural seperti tingkat kelurahan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat didoktrin dengan menawarkan hal-hal materi seperti menjanjikan memberi uang dan hal-hal materi lainnya. Banyak masyarakat tergiur dan jatuh dalam perangkap politik yang tidak demokratis.

Mengacu pada pernyataan informan bahwa bentuk hegemoni dalam realitasnya adalah dikategorikan persuasif dengan sikap pragmatis yang ditunjukkan adalah seperti menghadiahkan uang dan binatang peliharaan. Ini menunjukkan bahwa

perilaku yang memang sifatnya persuasif terkesan memaksa atau memaksa untuk mengharuskan. Dalam fenomena politik tidak etis tersebut masyarakat pemilih cenderung mengikuti dan menghilangkan asas-asas penting dalam berdemokrasi.

B. Saran

Dengan menyesuaikan pada pokok permasalahan penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak pemerintah

Hegemoni sosial dalam politik adalah bukan sesuatu hal yang baru, prakteknya benar-benar terjadi seperti di kabupaten Takalar dalam pilkada tahun 2017 lalu. Pihak pemerintah sebagai aparatur Negara haruslah netralitas, tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya untuk terlibat dalam kampanye politik. Hal tersebut sangat tidak etis dan bertentangan dengan UU.

2. Kepada kontestan dan timses

Dalam kontestasi politik seyogyanya mengedepankan politik yang demokratis. Dalam aktifitas politik baik kontestan maupun timses harus memperhatikan aturan-aturan yang di atur dalam kaidah hukum tata cara berkampanye. Hal ini sangat penting kerja sama dan komitmen bersama sebagai usaha peningkatan kualitas politik yang lebih demokratis.

3. Kepada masyarakat pemilih atau konstituen

Stigma bahwa politik itu kotor adalah sebetulnya tidak terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat sebagai konstituen. Maka dari itu, tolak politik yang tidak

mendidik atau merusak nalar publik. Dalam menentukan pilihan politik haruslah mendasarkan pada keyakinan diri dengan parameter yang jelas dalam mengenal paslon baik itu visi misi maupun program kerjanya.

4. Kepada aparaturnya penegak hukum

Sebagai penegak hukum harus netralitas dan proaktif dalam melihat fenomena-fenomena politik yang tidak demokratis. Jika mendapati pelanggaran dalam pilkada, maka harus mengambil sikap tegas dengan melandaskan pada konstitusi atau UU.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-fajri Leli Salman.(2011). *Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Langsung “Sebuah Pilihan Model Pemerintahan Daerah Demokratis*.Jurnal Aspirasi.1 (2).
- Batawi J.W. (2013). *TINGKAT Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada*. Jurnal Uniera. 2 (2).
- Creswell John W. (2010). *Researc Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik: Padang: Edisi Revisi*
- Fachan Yusa’, dkk. (2016). *Problematika Pilkada Langsung: Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada Langsung di Provinsi Sumatera Utara 2005-2007*.Jurnal Renaissance, 1 (1): 33-48.
- HR Ridwan. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagravindo Persada..
- Hasugian Andi Saputra. (2017). *Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Desa Di Kecamatan Mandau Dalam Pilkada Kabupaten Bengkalis Tahun 2015*. Jom Fisip. 4 (1).
- Haridison Anyualatha. (2013). *Kekuatan Partai Politik : Kasus Pemilukada Kota Palangka Raya*. Nyuli.1 (2).
- Haliim Wimmy. (2017). *Politik Indonesia*.Journal Unnes. 2 (2): 201-226..
- Kajian Moral Dan Kewarganegaraan. 02 (04): 313-327.
- Lauma Fachruddin Dkk, (2015).*Kualitas KPU Kota Manado Sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015*.(2015).
- Murtini.(2015). *Hegemoni Kekuasaan Dalam ‘Negeri Yang Membunuh Mataharinya Sendiri’ Karya Ken Saro-Wiya*.Nuansa Indonesia, XVII (1).
- Malaka Tan. (2011). *Gerpolek: Gerilya-Politik-Ekonomi* : Jakarta: Penerbit Narasi.

- Mukminin M. Arief Dkk, (2008). *Pengaruh Kualitas Kandidat Terhadap Respon Pemilih Pada Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Perode 2007-2012*. Interest Majalah Ilmiah. XI (2).
- Nopyandri. *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*. Jurnal Ilmu Hukum. 2 (2).
- Purnamasari Sri, Adi Agus Satmoko. (2016). *Etika Pemasaran Politik Dalam Strategi Pemenangan Saiful Illah Dan Nur Ahmad Syaifuddin Pada Pilkada Serentak Tahun 2015*.
- Rahmawati Naili Alfa, (2010). *Pemaknaan Gambar Lukisan Studi Semiotik Pemaknaan gambar Lukisan Pada Angkutan Becak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Rahman Abdul. (2017). *Kontribusi Tim Sukses Suparman Sukiman (Susuki) dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015*. Jom Fisip. 4 (02).
- Suyanto Isbondroini. (2013). *Kekuatan Politik di Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Saifullah. (2013). *Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siregar Eddie. (2013). *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: tentang Pennjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*: Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Suhardi. (2009). *Sosiologi*. Kihajar Dewantoro Klaten Utara: Departemen Pendidikan Nasional.
- Syarifuddin Dkk. (2018) *Buku Pedoman Penulisan Skripsi: Khusus Bagi Mahasiswa Bidang Kajian Penelitian Sosial Budaya*. Makassar:
- Salman Leli. (2011). *Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Langsung "Sebuah Pilihan Model Pemerintahan Daerah Demokratis"*. Jurnal Aspirasi. 1 (2).
- Sutrisno Cucu. (2017). *Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. 2 (2).

Satriawan Iwan Dkk. (2010). *Faktor-Faktor Kemenangan Calon Incumbent dalam Pilkada*. Jurnal Konstitusi. III (1).

Upe Ambo. (2010). *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Wisesa I Gede P. (2010). *Peranan Modal Sosial Dalam Kemenangan Satono Dari Jalur Independen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010*.

Widiyah Nur Kholifah Sri, Adi Agus Satmoko. (2017). *Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Dan Desa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 Di Sumenep*. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 05 (1).

Widodo Wahyu. (2015). *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Ilmiah Civis, V (1).

Zaman Rambe Kamarul. (2016). *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika.

Sumber Internet:

<http://meripaldimey.blogspot.co.id/2015/11/proposal-partisipasi-politik-masyarakat.html?m=1>.

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20170223194210-32-195775/calon-petahana-bupati-takalar-gugat-hasil-pilkada-ke-mk>.

<http://kuliahsosiologi.blogspot.co.id/2011/05/teori-hegemoni.html/m=1>.

<https://ourquranhadis.wordpress.com/2013/12/31/teori-sosial-konsep-hegemoni--antonio-gramsci/>.

<http://hegemoniwacana.blogspot.co.id/2013/04/hegemoni.html?m=1>.

https://googleweblight.com/?lite_url=https://liarkanpikir.wordpress.com/2011/10/15/teori-hegemoni-menurut-gramsci/&ei=e4A

Lembar Observasi

Tempat Observasi : Kelurahan Patte'ne

| No. | Aspek yang diamati | Keterangan |
|-----|---|------------|
| 1. | Deskripsi umum daerah penelitian | ✓ |
| 2. | Deskripsi khusus latar penelitian | ✓ |
| 3. | Peran pemerintah dalam menyikapi konflik pada pilkada tahun 2017 di kabupaten Takalar | ✓ |
| 4. | Bentuk hegemoni sosial dalam pilkada 2017 masyarakat Patte'ne kabupaten Takalar | ✓ |

Pedoman Wawancara

Berikut ini adalah pedoman wawancara dalam penelitian :

A. Narasumber kepala dan staf kelurahan

1. Selama proses pilkada Takalar pada tahun 2017 di Kelurahan Patte'ne, apakah berjalan kondusif?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik di Kelurahan Patte'ne dalam pilkada takalar tahun 2017?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam memecahkan konflik pada pilkada Takalar tahun 2017 di Kelurahan Patte'ne?
4. Apakah hegemoni sosial dalam proses pilkada tidak bertentangan dengan UU pemilukada?
5. Bagaimana praktek atau manifestasi dari hegemoni sosial dalam proses pilkada Takalar tahun 2017 di Kelurahan Patte'ne?

B. Narasumber personal KPU

1. Apa yang anda pahami tentang hegemoni sosial dalam konteks pilkada?
2. Selama proses pilkada Takalar pada tahun 2017, apakah berjalan kondusif?
3. Apakah hegemoni sosial dalam proses pilkada tidak bertentangan dengan UU pemilukada?
4. Pada praktek hegemoni sosial yang tujuannya adalah memobilisasi massa, apakah terdapat kandidat yang melakukan kecurangan?

5. Bagaimana peran anda sebagai personal KPU dalam melihat gejala konflik yang terjadi dalam masyarakat selama proses pilkada Takalar tahun 2017?

C. Narasumber masyarakat Patte'ne

1. Apakah anda terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pilkada takalar 2017?
2. Selama proses pilkada Takalar pada tahun 2017 di Kelurahan Patte'ne, apakah berjalan kondusif?
3. Pada saat pra pilkada, apakah terdapat tim sukses yang melakukan kecurangan dalam kampanye?
4. Apa yang melatarbelakangi sehingga terjadinya konflik di dalam masyarakat kelurahan Patte'ne selama proses pilkada Takalar tahun 2017?
5. Bagaimana dampak pilkada Takalar di kelurahan Patte'ne yang disebabkan oleh faktor beda pilihan politik?

Data Informan dalam Wawancara

1. Nama : Syafaruddin (SF)
Umur : 55 Thn
JenisKelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Kelurahan
2. Nama : Syamsuddin (SM)
Umur : 52 Thn
JenisKelamin : Laki-Laki
Jabatan : Masyarakat
3. Nama : Syammarsyam (SS)
Umur : 55 Thn
JenisKelamin :Perempuan
Jabatan :Masyarakat
4. Nama : Reskiwati (RK)
Umur : 25 Thn
JenisKelamin :Perempuan
Jabatan :Masyarakat
5. Nama : Arsyad (AS)
Umur : 45 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Pekerjaan :Masyarakat
6. Nama : Dg. Lebong (DL)
Umur : 70 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Pekerjaan :Masyarakat
7. Nama :Dg. Ngitung (DN)
Umur : 48 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki

Pekerjaan :Personal KPU

8. Nama :Dg. Gajang (DG)

Umur : 45 Thn

JenisKelamin :Laki-Laki

Pekerjaan :Staf kelurahan Patte'ne

DOKUMENTASI



Gambar : Wawancara dengan Kepala Kelurahan Patte'ne



Gambar : Wawancara dengan Staf Kelurahan Patte'ne



Gambar : Wawancara dengan Personal KPU



Gambar : Wawancara dengan Personal KPU



Gambar : Wawancara dengan salah seorang dari masyarakat Patte'ne



Gambar : Wawancara dengan salah seorang dari masyarakat Patte'ne



Gambar : Depan kantor kelurahan Patte'ne



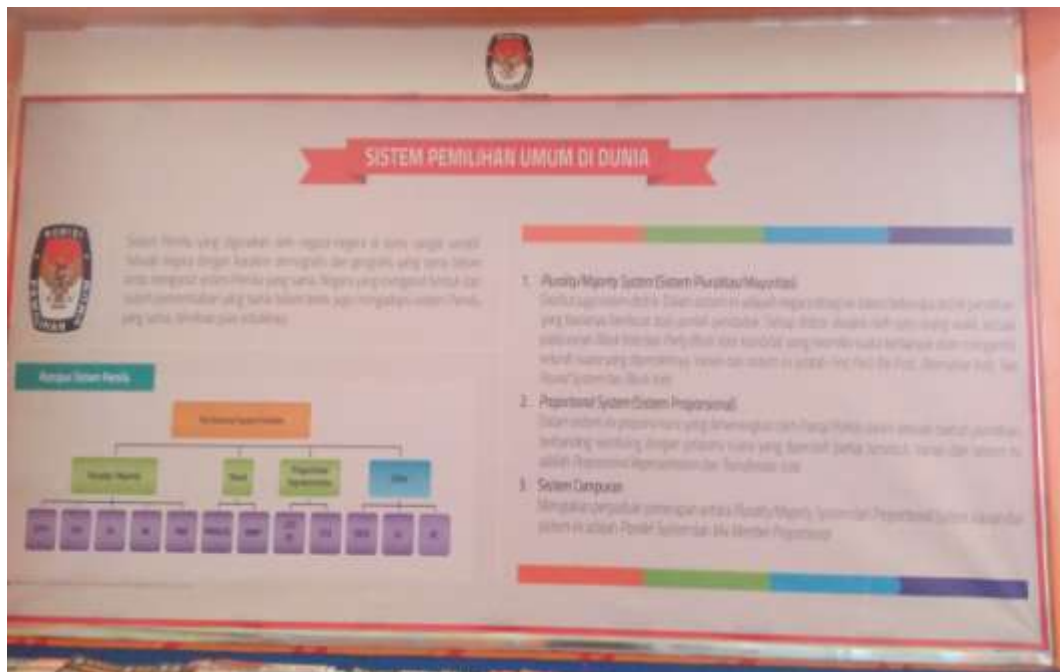
Gambar : Data demografi masyarakat Patte'ne



Gambar : Struktur organisasi pemerintahan kelurahan Patte'ne



Gambar : Tahapan penyelenggaraan pemilu



Gambar : Sistem pemilihan umum di dunia



Gambar : Metode kampanye



Gambar : Di ruangan KPU

RIWAYAT HIDUP



Fitri Dewi Handayani, lahir di Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Februari 1997 yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan yang berbahagia Bapak Syamsuddin dan Ibu Syammaryam. Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 12 Patte'ne 2002 dan tamat pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Takalar dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Takalar dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar melalui ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).